

**ANALISIS FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 4 TAHUN
2005 TENTANG ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (SSy)



Disusun Oleh:

**ANDI MUTIA PILKA
NIM : 10721 0000 95**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan. Di tulis dilatar belakangi adanya kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi tidak aman, merupakan salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi tidak aman. Sementara WHO memperkirakan 10-50% dari kasus aborsi tidak aman berakhir dengan kematian ibu.

Melihat bahaya akibat aborsi tersebut, maka pada mulanya seluruh lembaga fatwa di Indonesia, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih, MUI, dan Dewan Hisbah sepakat mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan, kecuali darurat, ada alasan medis, secara mutlak. Demikian pula mereka sepakat tentang batas haramnya aborsi adalah sejak terjadinya konsepsi.

Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, MUI kemudian lebih merinci hukum pengecualian, jika karena adanya uzur syar’i, baik darurat maupun hajat, seperti akibat perkosaan atau demi menyelamatkan jiwa ibu, atau karena menderita penyakit berat yang dapat mengancam jiwa si ibu, mereka membolehkannya dengan batasan dan syarat tertentu, seperti sebelum usia kandungan 40 hari, diromendasikan oleh keluarga, dokter dan ulama, pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang lahirnya fatwa MUI, dalil yang digunakan dalam fatwa MUI tersebut, dan tanggapan Ulama' lain tentang Aborsi anak korban pemerkosaan. Sementara bentuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan aborsi akibat pemerkosaan. Yaitu menggunakan kitab-kitab primer yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti kitab fiqh, dan buku-buku skunder lainnya, internet dan media informasi lainnya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, yang melatar belakangi lahirnya fatwa MUI tentang aborsi akibat pemerkosaan adalah kekhawatiran akan munculnya penderitaan yang akan ditanggung anak tersebut, aib yang harus diterima apa adanya dan tabu untuk dipublikasikan, dan sikap masyarakat yang memposisikan wanita yang hamil akibat perkosaan sebagai pihak yang dipersalahkan. **Kedua**, Dalil yang digunakan MUI untuk merumuskan Fatwa tentang Aborsi adalah Surat Al-Hajj: 5; Surat Al-Mu'minun: 12-14; Surat Al-Furqan: 68-69; Surat Al-An'am: 151, sedangkan kaidah fiqh yang digunakan adalah "*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*", "*Kebutuhan terkadang dapat menduduki keadaan darurat*", dan "*Kemadaratan membolehkan yang madarat (dilarang)*"; **Ketiga**, Berdasarkan prinsip-prinsip *kemashlahatan* dan *dhoruriyyah*, maka Ulama sepakat untuk membolehkan melakukan aborsi bagi korban perkosaan sebelum usia kandungan 40 hari.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayahnya tidak pernah luput dalam setiap detik kehidupan kita. Sholawat dan salam semoga tercurah selalu untuk junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, perjuangannya bersama keluarga dan para sahabat telah mengantarkan kita menuju dunia yang penuh peradaban dan kasih sayang, semoga kita mendapatkan di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) N0. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan”. Hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda dan Ibunda (Muslim dan Martina), yang mempunyai samudera kasih sayang yang begitu luas dan tak pernah kering terhadap Ananda, senyumanmu adalah kebahagiaanku dan membahagiakanmu adalah cita-cita terbesarku. Begitu juga untuk kakak, adik serta keluarga besar yang tidak dapat

penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan motivasi , inspirasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi ini hingga selesai

2. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA, Rektor UIN SUSKA Riau dan begitu juga Pembantu-Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA, M.Pd, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan begitu juga buat Pembantu-Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag. Dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag, sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsinya ini.
5. Bapak M. Abdi Al Maktsur, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dalam mengoreksi dan memberikan arahan demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal jariyah. Amin Ya Robbal Alamin.
6. Ibu Dra. Yusliati, MA, sebagai Penasehat Akademis, yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.

7. Bapak/Ibu Dosen dan civitas Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelek.
8. Teman-teman ku seperjuangan Lokal AH angkatan 2007 diantaranya Firman, Ulul, Hendra, Nakan Jalil, Nakan Devi, Winda, Helma, Dll. Juga buat teman-teman yang satu kos Perm. Mustamindo diantaranya moyan Andre, Itut, Oyul, Risa, Firning dan masih banyak teman yang lainnya senasib sepenanggungan yang terus buat suasana happy setiap waktu sehingga penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Special buat Adinda tersayang Syahnia, AMK. Yang gak pernah berhenti memberikan motivasi dan dorongan semangat serta doa buat penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan hasil yang sangat memuaskan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Pekanbaru, 25 Januari 2012

Penulis

ANDI MUTIA PILKA
NIM : 10721000095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
NOTA PEMBIMBING	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAJLIS ULAMA INDONESIA	
A. Latar Belakang Berdirinya MUI	17
B. Sejarah Berdirinya MUI	18
C. Program-program MUI	24
D. Proses Lahirnya Fatwa-Fatwa	26
BAB III : KONSEP ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN	
A. Aborsi	40
B. Aborsi Akibat Pemerkosaan	53
BAB IV : FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN	
A. Latar Belakang Fatwa MUI No. 4 tahun 2005	66
B. Deskripsi dan Dasar Fatwa MUI No. 4 tahun 2005	70
C. Pandangan Ulama tentang Aborsi	82
D. Analisis terhadap Fatwa MUI No. 4 tahun 2005	93
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukan yang mulia itu Allah melengkapi manusia dengan akal dan perasaan yang memungkinkannya dapat menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sekaligus mampu membudayakan dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Manusia adalah makhluk yang berkembang karena dipengaruhi pembawaan dan lingkungan. Selain itu, manusia mempunyai banyak kecenderungan lantaran banyaknya potensi yang dibawanya sejak lahir.¹

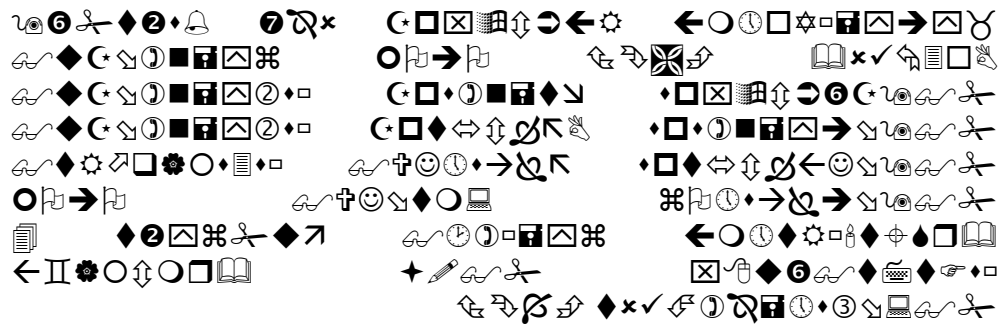
Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurnya berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.²

Allah SWT telah menceritakan proses penciptaan manusia dalam al- Qur'an secara terperinci, firman Allah Q.S. al-Mu'minûn, ayat 12-14:



¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Persepektif Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 35

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT. Ma'arif, 1980), hal. 10



"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik."³

Adapun ketika seorang wanita sedang hamil, dia tidak dipandang sebagai seseorang yang terserang penyakit, justru akan mendapatkan ucapan selamat dari keluarga, saudara dan tetangganya. Hal ini karena suatu kehidupan baru akan segera datang. Kehidupan baru itu oleh orang tua tidak disebut embrio atau janin, seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan atau dokter, akan tetapi para orang tua menyebutnya anak. Karena mereka sangat berharap kehidupan baru (anak) akan menjadi manusia yang akan tumbuh bersama mereka.

Seperti apa yang dikatakan oleh para ilmuwan atau dokter, di dalam perut seorang wanita yang hamil itu terdapat janin, istilah janin dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang diselubungi atau ditutupi. Secara hukum, terdapat sekitar tiga pendapat, satu pendapat mengatakan bahwa janin artinya sesuatu yang berada

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra, 1992), hal. 527

dalam rahim. Pendapat lain dari imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tahap (dalam rahim) yang dapat disebut janin adalah ketika tahap *al-mudgah* (gumpalan daging) dan *al-'alaqah* (sesuatu yang melekat) telah dapat dibedakan. Pada tahapan ini janin dapat disebut generasi manusia.⁴

Akan tetapi, akhir-akhir ini marak *trend* yang mengemparkan yang bisa terjadi karena semakin tinggi dan cepatnya tuntutan kehidupan. Salah satu perilaku yang menjadi trend itu adalah praktek aborsi atau penguguran kandungan.⁵

Kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi tidak aman, hanyalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi tidak aman.⁶ Sementara WHO memperkirakan 10-50% dari kasus aborsi tidak aman berakhir dengan kematian ibu.⁷ Angka aborsi tak aman (*unsafe abortion*) memang tergolong tinggi, diperkirakan setiap tahun di dunia terjadi sekitar 20 juta aborsi tak aman, 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih 70.000 aborsi tak aman di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu.⁸

⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, (Bandung : Mizan, 1997), hal. 136

⁵ ST. Rodliyah, "Peranan Pendidikan Islam dalam Mengantisipasi Aborsi", dalam *Jurnal Al-Adâlah*, vol. 8. No. 2, STAIN Jember 2005, hal. 36

⁶ Budi utomo dkk. 2002. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 kota Besar dan 6 kabupaten*. Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, hal. 7

⁷ WHO dalam Gulardi Wignyoastro. Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi. Makalah Seminar Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan PP Fatayat NU, pada 1 September 2001

⁸ The Alan Guttmacher Institute (AGI), "Sharing Responsibility: Women, Society and Abortion Worldwide", New York: AGI, p. 35, dalam Martha S. Ismail. *Promosi Kesehatan Reproduksi: Pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan/Kehamilan yang Tidak Direncanakan*

Secara umum sering terjadi aborsi dipraktekkan di luar profesi medis, yaitu dilakukan oleh dukun atau bidan, yang jika tidak dilakukan secara higienis bisa berisiko kematian bagi si ibu atau pelaku aborsi, kerusakan alat reproduksi sehingga tidak bisa hamil lagi secara permanen pasca melakukan aborsi.

Menurut Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI, bahwa pengertian aborsi itu sendiri adalah pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan,⁹ ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin. Dalam dunia kedokteran dikenal 2 macam aborsi yaitu:¹⁰

1. Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) adalah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu.
2. Aborsi buatan/disengaja (*abortus provocatus*) adalah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu.

Alasan-alasan aborsi dilakukan oleh seorang perempuan wanita hamil baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan.

Dalam garis besarnya ada dua macam alasan orang melakukan aborsi yaitu, dengan alasan medis dan alasan non medis. Akan tetapi alasan yang sering terjadi adalah alasan yang non-medis dan termasuk jenis aborsi buatan/sengaja.

Di Amerika alasan-alasan dilakukannya aborsi adalah, tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain, tidak

⁹ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2008), hal. 21

¹⁰ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2006), hal. 35-37

memiliki cukup uang untuk merawat anak, tidak ingin memiliki seorang anak tanpa ayah, karena akibat perkosaan dan alasan lain yang sering terjadi adalah masih terlalu muda terutama mereka yang hamil di luar nikah, aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Walaupun dari beberapa penelitian telah ditemukan, bahwa kehamilan akibat perkosaan pada korbannya kemungkinan nol (0) sampai 2,2 persen, yang artinya kehamilan akibat perkosaan kemungkinan tidak dapat terjadi.¹¹

Tetapi pada saat yang bersamaan, tidak dapat begitu saja mengesampingkan kemungkinan terjadinya kehamilan. Dalam kasus dimana kehamilan terjadi akibat perkosaan, maka dihadapkan dengan masalah apakah aborsi dibenarkan/dibolehkan. Orang cenderung akan menjawab setuju dengan memandang bahwa perbuatan seksual dilakukan pada wanita dengan paksaan, tidak atas kemauannya. Mereka tidak berpikir bahwa melakukan aborsi itu akan menjadi seorang pembunuh dan akan mengalami berbagai masalah kesehatan kandungan, seperti: infeksi, kanker rahim dan kemandulan yang permanen,¹² bahkan kematian. Perdarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan aborsi. Selain itu aborsi berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka. Perasaan berdosa dan ketakutan

¹¹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *op. cit*, hal. 146

¹² http://aborsi.org/tanya_jawab.html (diakses tanggal 25 November 2011)

merupakan tanda gangguan psikologis. Lebih lanjut, dampak yang dapat timbul akibat perbuatan aborsi, yaitu:

- (1) Pendarahan sampai menimbulkan *shock* dan gangguan neurologis/syaraf di kemudian hari, akibat lanjut perdarahan adalah kematian;
- (2) Infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril. Akibat dari tindakan ini adalah kemungkinan remaja mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah;
- (3) Risiko terjadinya *ruptur uterus* (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi. Akibatnya dapat juga kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat seluruhnya;
- (4) Terjadinya fistula genital traumatis, yaitu timbulnya suatu saluran yang secara normal tidak ada yaitu saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.¹³

Melihat bahaya akibat aborsi tersebut, maka pada mulanya seluruh lembaga fatwa di Indonesia, Bahtsul Masail, Majlis Tarjih, MUI, dan Dewan Hisbah sepakat mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan, kecuali darurat, ada alasan medis, secara mutlak. Demikian pula mereka sepakat tentang batas haramnya aborsi adalah sejak terjadinya konsepsi.¹⁴ Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, MUI kemudian lebih merinci hukum pengecualian, jika karena adanya uzur syar'i, baik darurat maupun hajat, seperti akibat

¹³ <http://www.rajawana.com/artikel.html/227-aborsi.pdf.htm>

¹⁴ Lihat Lysa Angrayni, " Aborsi Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007*

perkosaan atau demi menyelamatkan jiwa ibu, atau karena menderita penyakit berat yang dapat mengancam jiwa si ibu, mereka membolehkannya dengan batasan dan syarat tertentu, seperti sebelum usia kandungan 40 hari,¹⁵ diromendasikan oleh keluarga, dokter dan ulama, pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit tertentu.¹⁶

Secara lebih jelas, pendapat MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut terhimpun pada Fatwa No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, yang memutuskan:¹⁷

Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

¹⁵ Batas usia 40 hari ini muncul karena didasarkan pada hadits Zaid bin Wahb dari Abdillah berkata: Rasulullah SAW bercerita kepadaku dan beliau adalah orang yang paling benar :*"Sesungguhnya kamu berada dalam rahim ibumu selama 40 hari, kemudian menjadi 'alaqah selama masa yang sama, lalu menjadi mudghah pada masa yang sama pula. Lalu Allah mengutus seorang malaikat dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Malaikat itu kemudian diperintahkanNya menulis empat kalimat, lalu malaikat itu menulis rizkinya, ajalnya, kebahagiaannya dan kesengsaraan"* (HR. Muslim). Artinya sebutan embrio atau janin muncul ketika ia telah melewati masa 40 hari.

¹⁶ <http://www.mui.or.id>. Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, h. 3 (diakses tanggal 25 November 2011)

¹⁷ Ibid

- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dari fatwa tersebut menggambarkan bahwa kebolehan aborsi menurut MUI, ketika seseorang hamil yang diakibatkan oleh pemerkosaan. Kebolehan melakukan aborsi tersebut, didasarkan pada *uzur* yang ada, yaitu karena adanya hajat yang dimiliki oleh seseorang akibat di perkosa.

Pemerkosaan itu sendiri adalah suatu tindakan kriminal di saat si korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin, di luar kemauannya sendiri.¹⁸ Dari pengertian tersebut, menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum, artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.

Jadi, kehamilan akibat pemerkosaan berdampak buruk bagi seseorang yang mengalaminya. Hal ini yang mungkin menjadi pertimbangan MUI ketika mengeluarkan Fatwa tersebut diatas, yaitu dengan syarat sebelum usia kandungan

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal. 861

40 hari, diromendasikan oleh keluarga, dokter dan ulama, dan pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit tertentu.

Meskipun demikian, aborsi bisa mengingatkan kita, betapapun juga janin-janin itu bukanlah sekedar kumpulan daging belaka, tapi menyangkut keberadaan manusia, yang pada dasarnya memiliki hak hidup. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang bersaksi terhadap hal tersebut. Ketentuan-ketentuan dapat kita lihat dalam surat al-Maidah, al-Takwir, dan al-Isra' sebagai berikut :

Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qishash, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara keselamatan seluruh manusia semuanya.

“Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh.” (Qs. at-Takwiir : 8-9)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rejeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar (QS. Al-Isra' : 31)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِظَ اللَّهُ ۚ بَعْضُ النَّاسِ بَاطِلٌ فِي الْأَعْيُنِ عِنْدَ اللَّهِ قَتَلُوا نَفْسًا يَنْهَى اللَّهُ أَنْ تَقْتُلَ ۚ فَذَٰلِكُمْ لَكُمْ عِندَهُ بِكَبِيرٍ ۖ
 Dan janganlah kamu membunuh nyawa seseorang yang dilarang Allah, kecuali dengan alasan yang benar (QS. Al-Isra' : 33)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang, atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktik aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka patutlah penulis untuk melakukan kajian terhadap fatwa MUI tersebut, yang membolehkan aborsi akibat pemerkosaan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi akibat pemerkosaan.

B. Batasan Masalah

Didalam penelitian ini, yang menjadi inti dan fokus permasalahan penelitian adalah menganalisis Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi akibat pemerkosaan.

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, 1980, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Wabah), hal. 169

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa MUI?
2. Apa dalil yang digunakan dalam fatwa MUI tersebut?
3. Bagaimana tanggapan Ulama' lain tentang Aborsi akibat pemerkosaan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi lahirnya fatwa MUI?
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan dalam fatwa MUI tersebut?
- c. Untuk mengetahui pendapat Ulama' tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dari segi teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah hasanah pemikiran hukum dalam masalah kontemporer (aborsi) dari segi perlindungan anak.
- b. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku yang akan melakukan tindakan aborsi.

- c. Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan aborsi akibat pemerkosaan serta perlindungan anak, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi:

- a. Data tentang deskripsi Fatwa MUI no 4 tahun 2005, tentang aborsi akibat pemerkosaan.
- b. Data tentang latar belakang terjadinya aborsi akibat pemerkosaan.
- c. Data yang menjadi dasar istinbat Hukum Fatwa MUI tentang kebolehan aborsi akibat pemerkosaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, yaitu: Fatwa MUI No. 4 tahun 2005, tentang aborsi

b. Sumber Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Mengenai sumber data primer, yaitu:

- 1) Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*.
- 2) Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*.
- 3) Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*.
- 4) Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak menurut Persepektif Islam*.
- 5) Abdurrahman Al Jazairi, *Al Fiqhu 'Ala Madzahibi Al Arba'ah*
- 6) Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*
- 7) M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*.
- 8) Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*.
- 9) Dadang Harawi, *Dampak Seks Bebas Terhadap Kesehatan Jiwa*.
- 10) Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazi, *Janin Pandangan al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran*.

- 11) Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*.
- 12) Soka Handinah Kacasungkana, *Memutus Rantai Kekerasan terhadap Perempuan: perempuan dan kekerasan*.
- 13) Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*
- 14) Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*,
- 15) M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*,

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan teks (text reading) yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, setelah itu penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai bagaimana Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan.

4. Teknik Analisis Data

- a. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan tentang aborsi akibat pemerkosaan

- b. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif,²⁰ yaitu mengemukakan konsep yang bersifat umum, dalam hal ini adalah konsep aborsi kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang kasus aborsi akibat pemerkosaan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis yang tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut meliputi:

Bab I yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum tentang MUI di Indonesia, yaitu tentang sejarah dan profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kedudukannya di Indonesia..

BAB III, Kajian Teoritis; dimana bab ini berisi tentang dekripsi aborsi dan tanggung jawab merawat dan menjaga kesehatan anak, yang meliputi: pengetahuan, hukum, macam, sebab-sebab aborsi dan tanggung jawab merawat dan menjaga kesehatan anak.

BAB IV Analisis, yang merupakan pembahasan terhadap pokok masalah dari penelitian ini. Yaitu deskripsi dan latar belakang munculnya Fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang aborsi akibat pemerkosaan, juga membahas dasar-dasar

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 28

yang menjadi istinbat Hukum Fatwa MUI tentang kebolehan aborsi anak korban pemerkosaan.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada akhir skripsi memuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAJLIS ULAMA INDONESIA

A. Latar Belakang Berdirinya MUI

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia di Negara Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :¹

1. Di berbagai negara, terutama Asia Tenggara ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi dibidang keagamaan yang memiliki peran strategis.
2. Sebagai lembaga atau alamat yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan ulama Internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia.
3. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung serta penterjemah komunikasi antara umara dan umat Islam.
4. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah.
5. Sebagai wadah musyawarah bagi para Ulama, Zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.

Oleh karena itu, fungsi atau tujuan MUI adalah :

¹ Lihat di <http://mui.or.id>. Sebagai bahan perbandingan lihat juga di <http://mui-dki.org> serta <http://muijatim.or.id/>

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, akomodatif dan aspiratif.
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

B. Sejarah Berdirinya MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 orang Ketua Majelis Ulama Dati I se-Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama

dari Dinas Rohani Islam AD, AL, AU, dan POLRI, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah : NU (KH. Moh. Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. Nur Hasan Ibnu Hajar), Al Wasliyah (Anas Tanjung), GUPPI (KH. S. Qudratullah), PTDI (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Ittihadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas).²

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI yang pertama. Dengan demikian sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah - daerah telah terbentuk Majelis Ulama.

Dalam acara Pembukaan MUNAS MUI I tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden antara lain mengemukakan bahwa :

“Tugas para ulama adalah ‘amar ma’ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya; MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada Pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara Pemerintah dengan ulama”.³

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA

² <http://mui-dki.org>

³ <http://mui-dki.org>

MUI”, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Dalam acara peresmian MUI, Menteri Agama “Prof. Dr. H.A. Mukti Ali” menyatakan:

“Hari ini adalah hari berdirinya Majelis Ulama Indonesia, dan hari ini, ditempat ini, telah terkubur selama-lamanya iklim saling curiga mencurigai dan saling tidak percaya antara ulama dan umaro’. Pada hari ini dan di tempat ini pula telah didirikan tugu persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah diantara umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu setelah berdirinya MUI ini, hendaknya selalu dicari jalan untuk menimbulkan iklim saling memerlukan. Iklim itu hendaknya terus diisi, dibina dan diratakan dengan kerjasama yang sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara”.⁴

Dalam acara pembukaan, Prof. Dr. Hamka, sebagai Ketua Umum MUI pertama menyampaikan dalam kata sambutannya, antara lain

“Presiden kita menyatakan, bahwa ulama hidup di-tengah-tengah rakyat. Apa yang beliau utarakan itu benar-benar dari segi manis dan pahitnya. Kadang-kadang benar-benar ulama terletak ditengah-tengah, laksana Kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api; api yang dari bawah itu, ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihipit dengan api; api dari atas itu, ialah harapan-harapan dari Pemerintah supaya rakyat diinsyafkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat keatas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan Pemerintah, maksudnya tidak berhasil”.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ <http://mui.or.id>

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah

Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwa islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendikiawan muslim dalam memberikan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.⁶

Kepengurusan MUI disetiap jenjang berlangsung lima tahun. Sampai saat ini, MUI telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Nasional (Munas)

⁶ *Ibid*

yang antara lain memilih kepengurusan baru, dan sampai saat ini kepengurusan MUI tingkat pusat telah terselenggara dalam tujuh periode, yaitu :⁷

- ❖ Periode I (1975 – 1980), Ketua Umum Prof. Dr. Hamka, Sekertaris Umum Drs.H. Kafrawi Ridwan, MA.
- ❖ Periode II (1980– 1985), Ketua Umum KH. M. Syukri Gozali, Sekertaris Umum H.A. Burhani Tjokrohandoko, sebelum habis masa bakti H.A Burhani wafat, digantikan H.A. Qadir Basalamah.
- ❖ Periode III (1985 – 1990), Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekertaris Umum H.S. Projokusumo.
- ❖ Periode IV (1990 – 1995), Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sekertaris Umum H.S. Projokusumo.
- ❖ Periode V (1995 – 2000), Ketua Umum KH. Hasan Basri, Sebelum masa bakti berakhir KH. Hasan Basri wafat digantikan oleh Porf. KH. Ali Yafie, Sekertaris Umum Drs.H. Nazri Adlani.
- ❖ Periode VI (2000 – 2005), Ketua Umum DR. KH .MA. Sahal Mahfudz, Sekertaris Umum Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin.
- ❖ Periode VII (2005 – 2010), Ketua Umum DR. KH. M.A. Sahal Mahfudz, Sekretaris Umum : Drs. H. Ichwan Sam.
- ❖ Periode VIII (2010 – 2015), Ketua Umum DR. KH .MA. Sahal Mahfudz, Sekretaris Umum Drs. H.M. Ichwan Sam

⁷ *Ibid*

C. Program-program MUI

Salah satu dari berbagai kegiatan MUI dengan menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LP POM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan. Kosmetika

LP POM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LP POM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi-diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu Syari'ah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LP POM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.²

Selain itu, MUI selalu mengadakan kongres tahunan umat islam. Kali ini, pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia V ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam Kongres Umat Islam Indonesia IV 2005. Pada KUII IV Tahun 2005, Kongres mengambil tema utama **"Peneguhan Ukhuwwah Islamiyah untuk Indonesia yang**

Bermartabat.” Ukhuwwah Islamiyah dalam konteks kemajemukan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan bermakna guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, guna menjamin keberlanjutan agenda umat, pada KUII V ini mendesak sekali perumusan tentang pola kepemimpinan umat di tengah kemajemukan ini serta mendorong gerakan ekonomi umat, baik dari segi konsep maupun implementasi untuk kesejahteraan bangsa yang bermuara pada terbentuknya masyarakat Indonesia yang *mutadayyin* dan *mutamaddin*.

Kongres Umat Islam Indonesia diharapkan menjadi wahana efektif untuk menghimpun kekuatan umat yang terserak, mendiskusikan gagasan dan pemikiran dari berbagai elemen umat Islam guna merumuskan langkah strategis bagi revitalisasi peran Umat Islam. Kongres Umat Islam akan dapat mendorong terjadinya kesepahaman serta membuat rancang bangun perumusan strategis kebudayaan umat Islam Indonesia yang bermartabat dan saling menguatkan.

Kongres Umat Islam Indonesia V akan membahas dan merumuskan materi-materi sebagai berikut:

1. Masalah Kepemimpinan Umat Islam dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi, Paradigma, Visi, dan Karakter Kepemimpinan Islam; Penguatan Kelembagaan Umat serta Penguatan Jaringan Komunikasi Kelembagaan.

2. Masalah Ekonomi Umat Islam, yang meliputi: Paradigma dan Nilai Ekonomi Islam; Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat; dan Model Pemberdayaan Ekonomi Umat.
3. Rekomendasi tentang masalah kepemimpinan dan ekonomi umat dan bangsa.

D. Proses Lahirnya Fatwa-Fatwa Bidang Kedokteran (Medis)

Bidang kedokteran secara umum termasuk salah satu bidang keilmuan yang mendapat perhatian cukup besar dari para ulama, sejak masa nabi hingga dewasa ini, termasuk yang terkait dengan perkembangan teknologinya dari sisi etika dan hukum Islam. Dalam menentukan hukum, haram-halalnya suatu temuan ilmiah termasuk dalam bidang kedokteran, pada masa lalu Nabi, seluruhnya dapat diselesaikan oleh Nabi. Sedang pada masa berikutnya jika tidak dapat ditemukan dalam sumber ajaran Islam, al-Quran dan hadits, maka dilakukan ijtihad.

Dewasa ini para ulama dihadapkan pada masalah lebih rumit, karena banyak masalah-masalah kedokteran yang tidak ada penegasan dalam nash, Alquran dan Hadits, juga tidak ditemukan keterangannya dalam literatur fikih karena hal yang serupa belum diformulasikan oleh para pakar fikih (fuqaha) terdahulu, belum terjadi saat itu atau bahkan belum terpikirkan akan adanya. Di samping itu, juga mulai terkuaknya masalah lain yang terkait yang harus pula dipertimbangkan dalam menentukan hukumnya.

Di sisi lain, sekarang hampir tidak ada lagi orang yang mempunyai otoritas berijtihad secara mandiri karena orang yang memenuhi prasyarat akademis dan

moral yang diperlukan nyaris tidak dapat dijumpai lagi. Maka yang dilakukan adalah berijtihad secara kolektif (ijtihad jama'i) melalui lembaga atau organisasi keulamaan. Padahal secara normatif teoritis, ada interaksi antara perubahan dan perkembangan teknologi kedokteran dengan perubahan hukum Islam. Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada hukum yang mengikatnya, ada dalil yang menunjukkan atas hukumnya, jika tidak ditemukan secara jelas dalam nash maka dalil dicari dengan cara berijtihad. Dengan ijtihad, maka sesulit dan serumit apa pun persoalan yang dihadapi manusia, maka di situ ada ketentuan hukumnya.

Hukum Islam senantiasa dinamis dan sesuai dengan tuntutan masa dan tempat, intinya menarik yang bermanfaat serta menghindari yang mafsadat.⁸ Tujuan akhir ditetapkannya hukum Islam adalah menjadi rahmat bagi manusia, mewujudkan kemaslahatan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Ukuran dan sarana kemaslahatan itu tidak baku dan tidak tak terbatas, ia berubah seiring dengan perkembangan zaman.¹⁰

Secara metodologis, ulama menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber primer syariat Islam, Alquran dan Hadis, dua sumber komplementer yang merupakan sub-ordinat (ijmak dan qiyas), kaidah-kaidah suplementer, meliputi *Istihsan* (preferensi juristik), Amalan Penduduk Madinah, *al-Mashlih al-Mursalat* (kemaslahatan umum), *Istishhab* (aturan kesesuaian), *Syar' man*

⁸ Rahm n, J.A., *al-Mash lih al-Mursalat wa Mak natuh fi al-Tasyri'*, (Mesir : D r al-Kit b al-J mi'at, 1983), hal. 94

⁹ Zahrah, *Ushul Fikih*, (Mesir : D r al-Fikr al-'Arabi, 1995), hlm. 22

¹⁰ Rahm n, J.A, *Op. Cit*, hal. 117

Qablan , Madzhab *Shah bi*, *Sadd al-Dzar 'at* (menutup jalan yang dapat menghantarkan terjadinya kemaksiatan), dan 'urf.¹¹

Abd al-Rahim 'Umran menambahkan empat prinsip (kaidah) umum, yaitu: "Watak dasar segala hal adalah halal kecuali apabila dilarang oleh suatu nash, tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan, darurat membolehkan yang dilarang, dan memilih kemudaratkan yang lebih kecil."¹²

Hampir seluruh isu kedokteran dan kesehatan yang berkembang dewasa ini telah mendapatkan fatwa dari Ulama Indonesia. Dilihat dari segi jumlah topik kedokteran yang telah difatwakan, Bahtsul Masail tercatat yang terbanyak, diikuti MPKS, MUI, Dewan Hisbah, dan Majelis Tarjih. Ada dua isu (inseminasi buatan dan transplantasi) direspons oleh seluruh lembaga fatwa, selebihnya kadang hanya oleh sebagian saja, bahkan ada yang hanya oleh satu lembaga saja.

Penetapan fatwa terhadap tema kedokteran yang ditetapkan oleh lima lembaga fatwa dari segi metode atau dasar dalilnya, secara umum dapat digolongkan dalam tiga tipologi, yaitu:

1. Merujuk pada ketentuan dalam kitab-kitab fikih (*kutub mu'tabar*), dengan cara *tahb q* atau *Ilh q* (analogi), dilakukan oleh Bahtsul Masail.
2. Dengan slogan 'kembali kepada Alquran dan Hadis' oleh Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah, secara teoritis segala persoalan termasuk isu-isu modern dapat

¹¹ Khin MS., *Dir sat T r khiyyat li al-Fiqh wa Ush lih*, (Suriyah : al-Syirkat al-Muttahidat li al-Tauz ', 1984), hal. 98-101

¹² Umran, A.A., *Famili Planning in the Legacy of Islam*, (New York : Routledge, 1992), hal. 78-79.

dijawab dengan kedua sumber tersebut. Namun, ketika dihadapkan pada realita ternyata tidak terdapat dalam dua sumber tersebut, maka digunakan metode yang dirumuskan oleh para mujtahid, seperti istihsan, mashlahat mursalat, sadd al-dzar'at, dan sebagainya, termasuk karya-karya fikih masa lalu, namun tidak dinyatakan secara tegas.

3. MUI dan MPKS secara umum dapat dianggap sebagai perpaduan plus antara dua tipologi di atas, bersifat fleksibel dan dinamis, menggunakan sumber primer dan suplementer dan dinyatakan secara jelas.

Secara metodologis, meski tidak berarti meninggalkan sumber-sumber hukum atau metode pendukung lain yang menguatkannya, terlepas dari adanya kelaziman menyebutkan metode tersebut atau tidak tetapi secara aplikatif dapat ditentukan, ada satu metode atau lebih penetapan hukum yang kuat dan menonjol dijadikan sebagai dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Melalui sumber primer, Alquran dan Sunnah, atau dengan mengkiyaskannya.

Fatwa tentang larangan operasi ganti kelamin digunakan dalil dengan nash tentang larangan merubah ciptaan Allah dan menyerupakan diri dengan lain jenis. Proses pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim/vagina atau penanaman zigot dengan batasan menutup aurat dan larangan melihat aurat, agar 'memejamkan pandangan'.

Keharaman menggunakan jenazah untuk transplantasi dengan larangan menyakiti jenazah, atau secara spesifik larangan untuk tidak mematahkan tulang mayit. Mengonsumsi obat beralkohol dengan larangan minum

khamar. Bolehnya menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya sementara dengan 'azl. Kebolehan melakukan inseminasi buatan dan bayi tabung dengan anjuran umum agar berobat dan anjuran menikah serta berketurunan. Keharaman mengadakan bank sperma, inseminasi buatan dan bayi tabung donor, sewa rahim, dengan larangan zina dan 'menanamkan air' di tempat yang tidak halal, serta anjuran menjaga nasab. Transplantasi organ dan operasi perbaikan kelamin dengan anjuran berobat. Berobat dengan bahan dari unsur babi atau transplantasi dengan organ babi tercakup dalam larangan makan babi.

2. Melalui kaidah-kaidah suplementer, di antaranya:

- a. Istihsan atau konsep darurat, seperti terhadap isu tentang donor organ, transplantasi dengan organ orang mati, bedah mayat untuk pendidikan kedokteran dan pengadilan, penggunaan obat beralkohol dan organ babi, aborsi karena alasan medis, darurat.
- b. Sadd al-Dzar 'at digunakan untuk menetapkan haramnya penggunaan sperma donor, sewa rahim, transplantasi dengan sesama muslim, aborsi akibat perkosaan yang berakibat depresi berat.
- c. Mashlahat Mursalat, dijadikan sebagai argumen halalnya inseminasi buatan/bayi tabung, bedah mayat, transplantasi organ, dan KB..
- d. Istishh b digunakan karena tidak ada larangan dan perintah dalam nash maka difahami sebagai bentuk pembolehan, seperti fatwa tentang isu inseminasi buatan.

3. Melalui kitab-kitab fikih dengan cara men-*tathb q*-kannya atau meng-*ilh q*-kannya, seperti haramnya suntik mayat dan bedah mayat dianalogikan dengan haramnya khitan mayat, bolehnya bedah mayat untuk pendidikan atau pengadilan, donor dan transplantasi organ manusia dianalogikan dengan bolehnya mengeluarkan benda berharga atau bayi dari perut mayat.

Sementara hukum Kedokteran yang telah difatwakan ada sembilan isu. Berikut alasan yang mendasarinya oleh lima lembaga fatwa di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung.

Dilihat dari segi teknologinya, empat lembaga fatwa, Bahtsul Masail NU, Komisi Fatwa MUI, Dewan Hisbah PERSIS, dan MPKS menyepakati bolehnya melakukan inseminasi buatan dan bayi tabung, sepanjang sperma berasal dari suami dan ovum dari istrinya yang masih terikat dalam pernikahan dan dihamilkan oleh wanita pemilik ovum tersebut, dan mengharamkan inseminasi buatan atau bayi tabung donor karena akan berakibat merancukan nasab. Majlis Tarjih mengeluarkan fatwa dengan dua pendirian, membolehkan dan mengharamkan. Bahtsul Masail dan pendapat yang membolehkan bayi tabung dari Majlis Tarjih mewajibkan pula cara mengeluarkan sperma dan/atau ovum secara muhtaram atau tidak bertentangan dengan syara', bahkan Majlis Tarjih menyarankan agar petugas yang menandurkannya dalam rahim adalah wanita. Maksudnya, jika dalam proses pengeluaran sperma dan penandurannya dalam rahim tidak muhtaram

maka hukum inseminasi tersebut menjadi haram. MUI dan Dewan Hisbah lebih memperluas batasan kebolehan dan keharamannya, bagi suami yang berpoligami, zigot hanya boleh ditanam di rahim pemilik ovum demi menjaga kemurnian nasab.

2. Kloning

Lembaga fatwa yang sudah menetapkan hukum kloning baru dua lembaga, Bahtsul Masail dan MUI. Mereka sepakat mengharamkan kloning reproduksi manusia karena berakibat merancukan nasab, proses penanamannya dalam rahim bertentangan dengan batasan melihat aurat, merusak pranata sosial, dan akan merendahkan kehormatan insani, namun menghalalkan kloning pada tumbuhan dan hewan karena tujuannya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Sedangkan kloning terapeutic yang bertujuan untuk kemaslahatan/pengobatan, belum difatwakan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia secara khusus. Fatwa yang ada merupakan pendapat individual, di antaranya M. Qurasih Shihab yang menyatakan kebolehannta (Alkaf, 2003). Kebolehannta tersebut karena termasuk masalah, dan dilihat dari segi pelaksanaannya tidak terdapat unsur melanggar syariat, maka hukumnya termasuk yang dibolehkan.

3. Keluarga Berencana

Bahtsul Masail, Majlis Tarjih, MUI, dan Dewan Hisbah berbeda pendapat tentang hukum asal ber-KB. Majlis Tarjih termasuk kelompok yang mengharamkannya. Awalnya Bahtsul Masail mengharamkannya secara

mutlak, tetapi dalam perkembangannya terjadi pergeseran, membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan MUI menghalalkannya, demikian pula Dewan Hisbah menghalalkannya jika diartikan sebagai bentuk pengaturan keluarga, namun jika berarti pembatasan kelahiran hukumnya haram. Dilihat dari segi cara ber-KB, jika dilakukan dengan tidak menggunakan alat bantu, Bahtsul Masail yang sebelumnya mengharamkannya secara mutlak bergeser menetapkan hukumnya makruh (1960), kemudian ditegaskan kembali tetap makruh, dengan penambahan catatan jika darurat hukumnya mubah (1989). Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah menentukan hukumnya tergantung pada causa ('illat) dan tujuannya. Adapun hukum penggunaan alat kontrasepsi, khususnya IUD, hukum asalnya sama dengan di atas. MUI tetap dengan pendiriannya membolehkannya. Bahtsul Masail menetapkan hukumnya tergantung dari segi sudut pandangnya, dilihat dari segi kerja alat, tampak membolehkannya, namun jika dilihat dari segi pemasangannya, mengharamkannya karena dilakukan secara tidak muhtarom, karena mengharuskan melihat aurat berat wanita yang bukan isterinya, termasuk jika dipasang oleh wanita. Majelis Tarjih tidak memastikan hukumnya, hanya sebatas menyarankan agar dilakukan oleh orang yang sejenis. Dewan Hisbah tidak menyebutkan lebih lanjut tentang hukum penggunaan IUD. Satu lagi fatwa tunggal dari Bahtsul Masail tentang bolehnya menggunakan vaksin yang berasal dari sperma, karena telah terjadi perubahan karakter. Adapun tentang sterilisasi, MUI, MPKS, Majelis Tarjih, dan Bahtsul Masail

mengharamkan secara mutlak, dengan alasan termasuk tindakan merobah ciptaan Allah. Meski ada wacana dapatnya direhabilitasi, MUI tetap mengharamkannya karena tingkat keberhasilan pemulihannya kembali sangat kecil.

4. Aborsi

Seluruh lembaga fatwa di Indonesia, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih, MUI, dan Dewan Hisbah sepakat mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan, kecuali darurat, ada alasan medis. Demikian pula mereka sepakat tentang batas haramnya aborsi adalah sejak terjadinya konsepsi. MUI merupakan lembaga fatwa yang beberapa kali merevisi fatwanya. Awalnya termasuk yang mengharamkannya secara mutlak, dalam perkembangan berikutnya lebih merinci hukum pengecualian, jika karena adanya uzur syar'i, baik darurat maupun hajat, seperti akibat perkosaan atau demi menyelamatkan jiwa ibu, atau karena menderita penyakit berat yang dapat mengancam jiwa si ibu, mereka membolehkannya dengan batasan dan syarat tertentu, seperti sebelum usia kandungan 40 hari, diromendasikan oleh keluarga, dokter dan ulama, pelaksanaannya dilakukan di rumah sakit tertentu (MUI, 2005). Fatwa MUI terakhir mengundang reaksi dari Dewan Hisbah yang kemudian menetapkan bahwa aborsi bagi korban perkosaan hukumnya haram.

5. Transplantasi Organ

Pada prinsipnya seluruh lembaga fatwa di Indonesia mengharamkan transplantasi organ manusia. Majelis Tarjih, MPKS, MUI, dan Dewan Hisbah menambahkan kecuali darurat, juga termasuk untuk kepentingan ilmu

pengetahuan dan pendidikan kedokteran. Fatwa Bahtsul Masail mengalami pergeseran, awalnya mereka mengharamkannya secara mutlak namun kemudian direvisi yang selanjutnya difatwakan dengan dua pandangan, haram secara mutlak dan jaiz karena darurat. Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail mempersyaratkan menggunakan organ muslim. Bedanya, Dewan Hisbah sebatas menyarankan sedangkan Bahtsul Masail mengharuskannya. MPKS, Bahtsul Masail, dan Dewan Hisbah secara khusus telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan transplantasi menggunakan organ babi, kecuali tidak ada pilihan lain. Namun jika ada bahan pengganti, maka penggunaan gigi babi, Bahtsul Masail mengharamkannya secara mutlak.

6. Bank ASI

Fatwa yang berhubungan dengan praktek bank ASI hanya dikeluarkan oleh dua lembaga fatwa, MPKS dan Bahtsul Masail. Fokus pembahasan dalam fatwa ini bukan terletak pada boleh dan tidaknya dilakukan bank ASI tetapi kepada dampaknya jika hal tersebut terjadi. Pada prinsipnya mereka sepakat menghalalkan adanya Bank ASI dan memberikannya kepada yang memerlukan, namun mereka berbeda pandangan dari segi keberpengaruhannya pada hubungan kemahraman yang terkait dengan masalah hadats dan pernikahan. Bahtsul Masail menyatakan berdampak pada kemahraman sebagai anak susuan jika terpenuhi unsur-unsurnya, sedangkan MPKS menyatakan tidak berakibat menjadikan hubungan kemahraman. Perbedaan pandangan tersebut

terjadi karena perbedaan memaknai susuan dan perbedaan pendapat madzhab yang dianut pada saat menentukan batasan tentang susuan.

7. Operasi Ganti Kelamin

Hanya ada tiga lembaga fatwa di Indonesia yang sudah mengeluarkan fatwa khusus tentang hukum operasi ganti kelamin, yaitu Bahtsul Masail, MUI, dan Dewan Hisbah. Mereka sepakat mengharamkan operasi ganti kelamin dan membolehkan operasi mempertegas, memperbaiki, atau menyempurnakan jenis kelamin. Dalam upaya memastikan kesejatian jenis kelamin pra-operasi, atau yang belum jelas kesejatian kelaminnya, Bahtsul Masail menyarankan dibentuk tim ahli dari pihak-pihak terkait. Hasil keputusan tim itulah yang dijadikan acuan tentang boleh dan tidaknya dilakukan operasi. Jika operasi ganti kelamin terjadi, kesejatian kelamin yang bersangkutan berstatus sebagai saat sebelum dioperasi. Jika operasi perbaikan kelamin maka dia ditetapkan berjenis kelamin sebagaimana arah yang dikehendaki dari operasi tersebut. Keharaman operasi ganti kelamin karena termasuk merubah ciptaan Allah, dan dari qiyas aulawi dengan larangan menyerupakan dengan lain jenis.

8. Alkohol sebagai Campuran Obat

Baru tiga lembaga fatwa di Indonesia yang secara khusus mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan penggunaan alkohol sebagai campuran obat. Bahtsul Masail mengharamkan dan manajiskannya, tetapi jika untuk maksud pengobatan atau untuk menambah kualitas obat atau produk tertentu cenderung membolehkannya. MUI dan Dewan Hisbah mengharamkannya

secara mutlak, sedikit atau banyaknya, tetapi jika termasuk jenis obat topikal, MUI membolehkannya. Penganalogian haramnya alkohol dengan khamar berdasarkan pada nash, di samping karena sifat memabukkan juga karena zatnya.

9. Euthanasia dan HIV/AIDS

Sebagai bagian dari isu keedokteran yang penting, dalam produk fatwa lembaga fatwa MUI dan Bahtsul Masail fatwa tentang hukum euthanasia merupakan bagian dari fatwa tentang AIDS/HIV. Namun dalam penerapannya dapat terpisah. Bahtsul Masail dan MUI sepakat mengharamkan euthanasia bagi penderita HIV/AIDS. Logika yang dimaksud oleh kedua lembaga tersebut, jika untuk penderita HIV/AIDS yang jelas saat kematian dan kepedihan penderitaan yang dialaminya saja haram apalagi karena alasan lain. Dewan Hisbah termasuk yang mengharamkannya secara mutlak. Dewan Hisbah, MUI, dan Bahtsul Masail sepakat bahwa jenazah penderita HIV/AIDS harus tetap diurus sebagaimana mestinya, dilaksanakan oleh orang yang ahli. Bahtsul Masail secara khusus mengulas tentang hukum pernikahan bagi penderita HIV/AIDS, menurut mereka pernikahan bagi penderita HIV/AIDS adalah sah namun makruh.

Di samping soal teknis metodologi, terbukti pula bahwa Ulama Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan fatwa terikat oleh beberapa faktor. Pada umumnya setiap fatwa atas satu isu terikat oleh beberapa faktor atau ciri, seperti dapat dilihat di bawah ini:

1. Berkaitan dengan menjaga sebagian dari lima kemaslahatan (*al-Dlar riyy t al-Khams*) manusia, yaitu menjaga agama, keturunan atau kehormatan, jiwa, akal, dan harta. Fatwa tentang bolehnya bedah mayat untuk pendidikan dan pengadilan didasari pertimbangan kemaslahatan untuk kemajuan bidang ilmu kedokteran yang sangat diperlukan dalam kehidupan, termasuk bagian dari menjaga kehidupan. Fatwa tentang inseminasi buatan dan bayi tabung untuk menjaga keturunan dan kehormatan. Sterilisasi, aborsi, dan menikah bagi penderita HIV/AIDS berlawanan dengan prinsip tersebut. Pembolehan dan penolakan KB juga terkait dengan pemeliharaan keturunan. Larangan mengkonsumsi alkohol, khamar, atau zat adiktif lainnya dalam rangka memelihara akal. Larangan melakukan euthanasia dan membuang zigot sisa bayi tabung untuk menjaga jiwa.
2. Berkaitan dengan mencintai, memelihara, mempertahankan, menghormati kehidupan insani. Fatwa yang mengharamkan transplantasi organ, bedah mayat, suntik mayat berkaitan dengan penghormatan atas jasad insani, meski sudah meninggal. Fatwa tentang haramnya euthanasia dan aborsi menunjukkan adanya tindakan, memelihara, mempertahankan, dan menghormati kehidupan insani.
3. Berkaitan dengan lebih mementingkan kebutuhan orang hidup daripada kehormatan orang mati. Fatwa tentang bolehnya donor organ, transplantasi organ manusia, bedah mayat untuk pendidikan dan pengadilan, dan otopsi terkait dengan faktor ini.

4. Berkaitan dengan syukur nikmat dan menerima kodrat. Fatwa tentang keharaman operasi ganti kelamin dan sterilisasi karena menunjukkan tidak bersyukur atas karunia Ilahi dan menolak kodrat.
5. Berkaitan dengan pemeliharaan nasab. Fatwa tentang haramnya inseminasi buatan dan bayi tabung donor, kloning reproduksi, ibu tumpang atau sewa rahim karena akan merancukan nasab.
6. Berkaitan dengan etika kepatutan dan menutup aurat. Fatwa tentang haramnya pemasangan IUD, penanaman zigot dalam proses bayi tabung dan kloning terkait dengan batasan ini.
7. Berkaitan dengan peningkatan produktivitas ekonomi. Isu tentang bolehnya kloning hewan dan tumbuhan terkait dengan tujuan ini.

BAB III

KONSEP ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN

A. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi (الإجهاض) menurut ulama' fiqh: kalangan Syafi'i, Syi'ah dan Ja'fariyyah menggunakan kata (إسقاط) yang maknanya sepadan dengan kata الإجهاض. Dengan demikian makna (إسقاط) menurut ahli fiqh adalah keluarnya janin dari perempuan yang hamil sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan mati atau hidup sebentar dan telah tampak sebagian pembentukannya, baik dilakukan oleh dirinya sendiri seperti meminum obat ataupun akibat perbuatan lain.¹

Kemudian dalam ensiklopedi nasional Indonesia menyebutkan, bahwa aborsi adalah pengakhiran kelahiran sebelum masa getasi 28 minggu atau sebelum janin mampu hidup di luar rahim.² Sementara itu, Maryono Reksediputra menyatakan bahwa, aborsi adalah mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat hidup secara alamiah).³

Dalam mendefenisikan aborsi, terdapat sejumlah pendapat yang berbeda satu sama lain, diantaranya adalah: *Pertama*, menurut *Fact About Abortion, info*

¹ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazi, *Janin Pandangan al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran*, (Surabaya : Pustaka Rahmat, 2009), h. 90

² Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 22

³ Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Aternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Restu Ilahi, 2005). h. 55

Kit on Woman's Health, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai usia 20 minggu. *Kedua*, terjadinya keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).⁴

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja ataupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan). Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, aborsi yang dikenal sebagai tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.⁵

Aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh wanita akhir-akhir ini mempunyai sejumlah alasan yang berbeda-beda. Banyak alasan mengapa wanita melakukan aborsi, diantaranya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :⁶

1. Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak.

⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 224.

⁵ *Ibid*, hlm. 225.

⁶ Lysa Angrayni, " Aborsi Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Islam. Vol. VII No. 5. Juli 2007*, hlm. 537

2. Adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin membatasi atau menangguhkan perawatan anak karena ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu.
3. Alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk mempunyai bayi.
4. Akibat adanya hubungan yang bermasalah (hamil diluar nikah) atau kehamilan karena perkosaan dan incest sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi.
5. Alasan bahwa kehamilan akan dapat mempengaruhi kesehatan baik bagi si ibu maupun bayinya. Mungkin untuk alasan ini aborsi dapat dibenarkan.

Adapun unsur-unsur terjadinya aborsi, sekurang-kurangnya ada 3:⁷

1. Adanya embrio (janin) akibat hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalam rahim.
2. Adanya pengguguran, terjadi dengan sendirinya atau disebabkan oleh manusia.
3. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya (sebelum masa kelahiran tiba).

⁷ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2008). h. 22

2. Macam-Macam Aborsi

Dalam dunia kedokteran dikenal 2 macam aborsi yaitu:⁸

- a. Aborsi spontan (abortus spontaneus) adalah aborsi yang terjadi secara alamiah atau aborsi yang tidak disengaja.
- b. Aborsi buatan/disengaja (abortus provocatus) adalah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Dan aborsi ini ada dua macam, ialah:
 - 1). Aborsi artificialis therapicus: aborsi yang dilakukan oleh dokter atas indikasi medis. Misalnya, jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si ibu.
 - 2). Aborsi provokatus criminalis: aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan karena hasil hubungan di luar perkawinan.

Sedangkan aborsi menurut fikih ada 5 macam:⁹

- a. Aborsi Spontan (*al-isqât al-zâty*) adalah janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Misalnya, adanya kelainan kromosom sehingga mudgah tidak bisa tumbuh normal.
- b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqât al-darûryal-‘ilâjîy*), misalnya: aborsi yang dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.

⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta : Haji Masagung, 1992), h. 77-78

⁹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, h. 38-41

- c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (khatâ'), misalnya: seorang polisi memburu pelaku kejahatan disuatu tempat yang ramai pengunjung, karena takut kehilangan jejak, polisi menembak pelaku akan tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan keguguran.
- d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (syibh'amd), misalnya: seorang suami yang menyerang isterinya yang sedang hamil sehingga mengakibatkan ia keguguran.
- e. Aborsi sengaja dan terencana (al-'amd), misalnya: seorang yang hamil sengaja meminum obat dengan maksud agar kandunganya gugur atau ia sengaja menyuruh orang (dokter atau dukun) untuk mengugurkan kandungannya.

3. Sebab-Sebab Aborsi

Adapun penyebab para ibu atau para remaja putri melakukan tindakan aborsi ada bermacam-macam, diantaranya:¹⁰

- a. Atas indikasi medis, seperti:
 - 1). Untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu hamil.
 - 2). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani apabila janin dilahirkan.
- b. Atas indikasi sosial, seperti:¹¹

¹⁰ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, h. 23

- 1). kerena kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam mencegah kehamilan;
- 2). karena sudah menemukan dokter yang bersedia membantu untuk menggugurkan kehamilan;
- 3). Karena ingin menutupi aib, seperti dilakukan oleh orang yang belum bersuami, atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami yang terdorong oleh godaan atau kenikmatan sesaat;
- 4). Karena kesulitan ekonomi, kelahiran sang anak tidak diharapkan bahkan dianggap menjadi beban hidup;
- 5). Karena kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, pada kondisi ini kehadiran anak sangat tidak diharapkan.

Sedangkan akibat atau dampak melakukan aborsi adalah:¹²

a. Pendarahan

Hal ini disebabkan karena penguguran tidak memakai alat yang semestinya. Dan yang paling fatal dari pendarahan adalah kematian.

b. Infeksi

Disebabkan karena peralatan tidak diperhatikan kebersihan atau kesterilannya. Akibat infeksi ada jangka pendek dan panjang, jangka

¹¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, h. 48-49

¹² ST. Rodliyah, "Peranan Pendidikan Islam dalam Mengantisipasi Aborsi", dalam *Jurnal Al-Adâlah*, vol. 8. No. 2, h. 41

pendeknya adalah bisa menyebabkan kematian. jangka panjangnya adalah tidak bisa punya anak dan gangguan pada organ dalam wanita.

c. Psikologi pasien

Disebabkan karena wanita yang melakukan aborsi biasanya menyesal atau merasa bersalah seumur hidup.

d. Emboli

Adanya benda yang masuk kedalam sirkulasi darah sehingga menyumbat pembuluh darah dan pada akhirnya meninggalkan pelaku.

4. Hukum Aborsi

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang bersaksi terhadap hal tersebut. Ketentuan-ketentuan dapat kita lihat dalam beberapa ayat berikut ini:

Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qishash, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara keselamatan seluruh manusia semuanya

“Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh.” (Qs. at-Takwiir : 8-9)

mengatakan, bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar.¹⁴

Meski demikian pendapat para ulama berkaitan dengan kasus di atas yang berakhir dengan aborsi sangat beragam, khususnya dalam hal penentuan bilakah dibolehkannya pengguguran kandungan dengan alasan yang dibenarkan tersebut. Ulama dari madzhab Hanafi membolehkan pengguguran kandungan sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan.¹⁵

Pandangan sebagian ulama lain dari madzhab ini hanya membolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudghah* atau janin memasuki usia 40 hari kedua.¹⁶

Mayoritas ulama Hanabilah membolehkan pengguguran kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah (*'alaqah*) karena belum berbentuk manusia.¹⁷ Syafi'iyah melarang aborsi dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi, di antaranya dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, tetapi sebagian lain dari mereka yaitu Abi Sad dan Al-Qurthubi membolehkan. Namun Al-Ghazali dalam *Al-Wajiz* pendapatnya berbeda dengan tulisannya dalam *Al-Ihya*, beliau mengakui kebenaran

¹⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*. Terj. Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan, (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 156

¹⁵ Ibnu Abidin. *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*. (Beirut: Daar al-Fikr, tt), jilid 2 hal. 411.

¹⁶ *Ibid.* hal. 302

¹⁷ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughni*. (Cairo: Hajar, tt), jilid 12, hlm. 210.

pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah (*'alaqah*) atau segumpal daging (*mudghah*) tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan.¹⁸

Kecuali mayoritas ulama Malikiyah melarang aborsi. Landasan hukum yang digunakan sebagai argumentasi bagi ulama-ulama tersebut adalah dua hadis Nabi berikut:

“Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud RA berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah ('alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia” (HR. Muslim).¹⁹

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila nutfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itu pun menulisnya”.(HR. Muslim).²⁰

Namun demikian pandangan ahli fikih yang membolehkan aborsi tersebut dalam realitas sosial tidak dapat dijadikan alternatif bagi perempuan yang tidak menghendaki kehamilannya. Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia berdasarkan Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: I/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000 ditetapkan:

¹⁸ Al-Ghazali, *Al-Wajiz*. (Beirut : Daar Al-Ma’rifah, tt), hlm. 158.

¹⁹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Kitab al-Qadar, Bab Kaifiyyah al-Khalqi al-Adami fi Batni Ummihi..., no. 6893

²⁰ *Ibid.*

- (1) Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu;
- (2) Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkh al-ruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam;
- (3) Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu atau mengizinkan aborsi.

Ketetapan MUI tersebut, apabila dicermati bahwa pada dasarnya sebagaimana ahli fikih umumnya, MUI mengharamkan praktik aborsi termasuk di dalamnya pihak yang turut serta melakukan, membantu dan mengizinkan aborsi. Meski demikian terdapat kebolehan aborsi apabila memenuhi beberapa unsur:²¹ *Pertama*, melakukan aborsi sebelum ditiupkannya ruh (*nafkh al-ruh*); *Kedua*, melakukan aborsi sebelum ditiupkannya ruh (*nafkh al-ruh*), hanya boleh dilakukan apabila: (1) jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu; dan (2) ada alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam.

Perdebatan di antara ahli fikih dalam hal aborsi tersebut, jika kita amati, akar perdebatannya adalah pada batas kehidupan. Sejak kapan sesungguhnya kehidupan itu dimulai? Bahasa yang digunakan teks sulit sekali diklarifikasi, hanya menyatakan “sebelum tercipta” atau “sebelum menjadi manusia” (*qabla takhalluq*). Al-Qur'an menyebutkan proses pentahapan penciptaan manusia terdiri dari *nutfah*, *'alaqah* dan *mudghah*, kemudian Allah

²¹ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury. *Sahih Muslim* (Libanon: Beirut: Daar Al-Fikr, 1992), hadis nomor 2643, jilid 2, hal. 549.

menjadikan makhluk dalam bentuk lain, sebagaimana diinformasikan Q.S. Al-Mukminun/23:12-14) berikut:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang tersimpan di tempat yang aman dan kokoh. Dalam perkembangan selanjutnya, air mani itu Kami olah menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami olah menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging itu Kami olah menjadi tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Selanjutnya Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya. Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik”.

Dalam ayat tersebut tidak menjelaskan secara tegas kapan sesungguhnya memasuki kehidupan sebagai manusia, apakah sejak tersimpan dalam rahim atau istilah kedokteran sejak zigot melekat dalam endometrium yang disebut dengan nidasi (*implantasi*) atau apakah sejak Tuhan menjadikannya sebagai makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya (*khalqan aakhar*).

Kata *khalqan* berasal dari *khalaqa* artinya penciptaan. Di dalam Al-Qur'an ditemukan makna yang sama antara *khalaqa* dan *ja'ala*, seperti *khalaqa minha zaujaha* (An-Nisa/4:1) dan *ja'ala minha zaujaha* (Al-A'raf/7:189), keduanya memiliki arti yang sama. Tetapi dalam hal penciptaan ini, kata *khalaqa* menunjukkan kemahakuasaan dan kehebatan Allah yang tiada tara, sedangkan kata *ja'ala* hanya menunjukkan bahwa penciptaan itu dari materi yang sudah ada, yakni *nafs waahidah* (satu jenis dari bahan baku yang sama). Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa penciptaan dengan kata *khalq* bersifat gradual, seperti manusia berasal dari percampuran antara spermatozoa laki-laki dan ovum perempuan, kemudian menjadi zigot, embrio

dan seterusnya.²² Sedangkan kata *khalqan aakhir*, artinya *binafkhi alruh fiih*, dengan meniupkan ruh ke dalam penciptaannya.²³

Mengenai batas awal kehidupan manusia kapan persisnya roh ditiupkan, di dalam hadis pun tidak dijelaskan, hanya disebutkan bahwa proses sperma (*nutfah*) berlangsung selama 40 hari pertama, 40 hari kedua berupa segumpal darah (*'alaqah*) dan 40 hari ketiga berupa segumpal daging (*mudghah*), setelah itu baru ditiupkan roh. Tetapi roh itu apa? Tidak ada penjelasan secara rinci, hanya disebut bahwa roh adalah urusan Tuhan. Tetap misterius hingga sekarang, karena hanya Tuhan yang mengetahui, sebagaimana disebutkan Al-Qur'an surat Al-Israa' / 17:85 tadi.

Teks tersebut adalah fakta yang menginformasikan bahwa roh adalah otoritas Tuhan, kapan ditiupkan ke dalam jiwa manusia menjadi kehidupan dan kapan dilepaskan dari dalam jiwa manusia menjadi sebuah kematian tidak ada seorang pun yang mengetahui. Meskipun proses kehidupan dan kematian tersebut seluruhnya merupakan hukum alam (*sunnatullah*), tetapi tidak seluruhnya transparan dapat diketahui manusia karena ada rahasia alam yang menjadi domain Tuhan yang disebut metafisik (*gha'ib*), hanya bisa dirasakan tetapi tidak dapat diinderakan.

Secara eksplisit dari hadis di atas tertangkap informasi bahwa roh ditiupkan ke dalam janin setelah 40 hari ketiga atau setelah kehamilan berusia

²² Quraish Shihab. *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata an Tafsirnya*. (Jakarta: Yayasan Bimantara, 1997). hal. 210.

²³ Gulardi H. Wignjosastro dalam Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*

120 hari. Sementara dalam Al-Qur'an, dengan kata *khalqan aakhar* yang memiliki arti ditiupkan roh kedalam janin (*binafkhi al-ruuh fiih*) menunjukkan bahwa proses pembentukan manusia sudah berakhir saat roh ditiupkan kedalam janin. Setelah itu, janin disebut menjadi makhluk yang lain yang secara substansial telah memiliki akal dan raga. Berbeda dengan sebelumnya yang secara substansi hanya memiliki raga tetapi belum berakal. Mengenai waktunya, saat kehamilan usia berapa hari peniupan roh tersebut terjadi, menjadi rahasia Tuhan sejak ayat tersebut turun hingga sekarang.

Hal tersebut diakui oleh Gulardi Wignjosastro³³, pakar kebidanan dan kandungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bahwa tidak ada satu alat pun yang dapat mendeteksi kapan kehidupan manusia itu dimulai. sedangkan kata *khalqan aakhar*, artinya *binafkhi alruh fiih*, dengan meniupkan ruh ke dalam penciptaannya.

B. Aborsi Akibat Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat si korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin, di luar kemauannya sendiri.²⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 861

kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum, artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluannya seorang wanita.²⁵

Adapun unsur-unsur perkosaan menurut Sugandhi adalah:²⁶

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- b. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
- c. Kemaluan pria harus dimasukkan pada lubang kemaluan wanita.

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wulandari, bahwa "perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam, ialah:²⁷

- a. Karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya.

²⁵ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001). h. 41

²⁶ Ibid, h. 41

²⁷ Ibid, h. 66-67

- b. Karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno.
- c. Karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya.
- d. Karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan untuk memungkinkan dilakukannya pemerkosaan".

Sedangkan menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menyebutkan bahwa penyebab terjadinya pemerkosaan adalah:²⁸

- a. Pengaruh atas budaya yang tidak menghargai etika berpakaian yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat jahat.
- b. Gaya hidup atau pergaulan yang bebas antara laki-laki dan perempuan.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma agama.
- d. Tingkat kontrol sosial (social control) yang rendah.
- e. Putusan hakim yang terasa tidak adil.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan hawa dan nafsu seksualnya.
- g. Adanya keinginan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakitkan dan merugikan.

Adapun dalam kasus pemerkosaan ada tiga hal atau unsur:

- a. Pelaku
- b. Korban

²⁸ Ibid, h. 72

c. Situasi atau Kondisi

Ketiga hal tersebut di atas, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yang masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu pemerkosaan. Ditinjau dari aspek viktimologis (suatu ilmu yang berbicara mengenai korban kejahatan), wanita yang menjadi korban perkosaan bukan hanya menderita sakit fisik, tetapi juga menderita trauma psikologis.²⁹

Korban dihantui oleh tindakan kekerasan seksual yang menimpanya. Para korban merasa, bahwa kehadiran orang lain (lawan jenis) dianggap sebagai ancaman yang membahayakan dirinya. Akhirnya ia teralienasikan (terasing) dari komunitas sosialnya. Kasus kebiadaban (kekerasan seksual) yang menimpanya telah merenggut harga dirinya dan membuatnya seperti sosok manusia yang tidak berguna lagi di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Iswardhani, secara fisik korban pemekosaan mengalami luka pada kelamin perempuan (alat Vital), tertular penyakit kelamin, hamil dan meninggal dunia. Sedangkan secara sosiologis, dalam jangka pendek tingkah lakunya berubah, menjadi penakut, prestasi sekolah menurun (korbannya anak-anak) dan dalam jangka panjang, terjadi kelainan perilaku seksual maupun perkembangan jiwanya.³⁰

²⁹ Abdul Wahid, *Islam dan Idealitas Manusia*, (Yogyakarta, SIPRESS, 1997). h. 146

³⁰ *Ibid*, h. 147

Termasuk dalam akibat terburuk adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada korban pemerkosaan, kondisi korban pemerkosaan lebih parah bila dibandingkan dengan korban pemerkosaan yang tidak hamil, karena pada korban pemerkosaan yang hamil ia akan mendapat dua beban yang sangat beratnya, yaitu trauma atas pemerkosaan dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Kondisi inilah yang biasanya memicu korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi atas kehamilan yang tidak diinginkannya tersebut. Akibat ini sebenarnya bukan terjadi pada fisiknya, tetapi cenderung pada psikisnya sebagai akibat tekanan dari luar yang diderita oleh korban pemerkosaan.³¹

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluannya seorang wanita.³²

Secara psikologis, seorang perempuan yang menjadi korban perkosaan tidak saja akan menderita sakit fisik, tetapi juga menderita trauma psikologis.³³ Korban dihantui oleh tindakan kekerasan seksual yang menimpanya. Para korban merasa, bahwa kehadiran orang lain (lawan jenis)

³¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, (Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2006), h. 79

³² Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2001). h. 41

³³ Abdul Wahid, *Islam dan Idealitas Manusia*, (Yogyakarta : SIPRESS, 1997) hal. 146

dianggap sebagai ancaman yang membahayakan dirinya. Sementara secara sosiologis, ia merasa teralienasi (terasing) dari komunitas sosialnya. Karena ia merasa tidak berguna lagi berada di tengah-tengah masyarakat.³⁴

2. Pandangan Ulama tentang Pemerkosaan

Dalam ajaran agama Islam, tidak diperbolehkan memenuhi hasrat seksual lewat cara-cara yang tidak halal. Hal ini dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an :



"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk" (QS. al-Isrâ': 32)³⁵

Al-Qur'an dan hadîs tidak ada istilah yang merujuk secara langsung pada istilah perkosaan, kecuali tentang zina Mengenai perzinaan, Islam dalam berbagai ayat al-Qur'an atau teks hadîs melarang perzinaan. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa "zina, perzinaan dan persetubuhan" itu hubungan kelamin atau seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan zakar atau kelamin laki-laki ke dalam farji (alat kelamin) perempuan minimal sampai batas fulqoh (kepala zakar).³⁶

³⁴ *Ibid*

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 429

³⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual ...*, h.

Pendapat ini menunjukkan bahwa hubungan seks dapat dikatakan sebagai hubungan perzinaan apabila terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar hubungan perkawinan yang sah, persetubuhan ini terletak pada ukuran masuknya penis pada kemaluan wanita. Jika sekurang-kurangnya kepala zakar belum masuk ke dalam farji, maka belum tepat dikatakan terjadinya perzinaan.

Para Ulama, membagi dua hukum terkait pemerkosaan ini; *Pertama*, Pemerkosaan yang tidak disertai dengan ancaman. Orang yang melakukan perbuatan ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang melakukan zina, jika ia belum menikah dicambuk 100 kali dan apabila sudah menikah dirajam. Namun demikian, sebagian Ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi perempuan yang menjadi korban. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik dalam kitab *Muwatha'* :

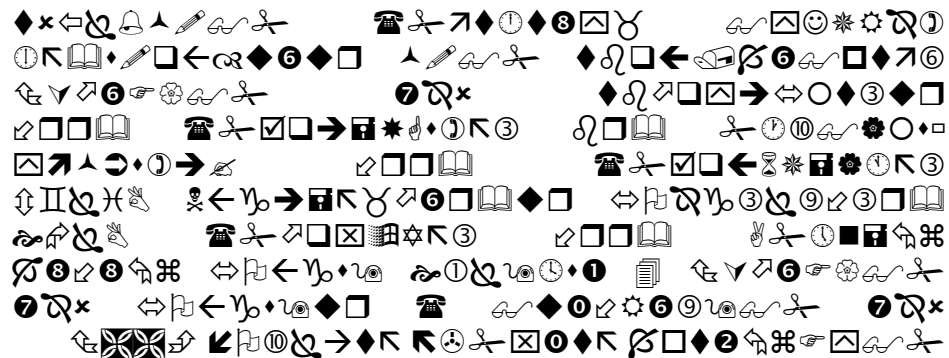
Menurut kami mengenai orang yang memperkosa baik masih gadis atau sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka, maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada korban. Sementara jika wanita itu adalah budak, maka pemerkosa wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak tersebut. Sedangkan perempuan yang menjadi korban tidak mendapat hukum sama sekali.³⁷

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Tsauri orang yang memperkosa berhak mendapat hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.³⁸

³⁷ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, jilid 2, hal. 734.

³⁸ Lihat di <http://konsultasisyariah.com/hukum-kasus-pemerkosaan>.

Kedua, Pemerkosaan yang disertai dengan ancaman. Beberapa Ulama', menyamakan perilaku ini dengan merampok. Sementara hukum merampok sudah sangat jelas dideskripsikan didalam al-Qur'an, yaitu ;



Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS. Al-Maidah : 33)

Dari ayat ini, menunjukkan bahwa ada beberapa pilihan bagi hakim untuk memberi hukuman terhadap pelaku pemerkosa dengan ancaman, yaitu :

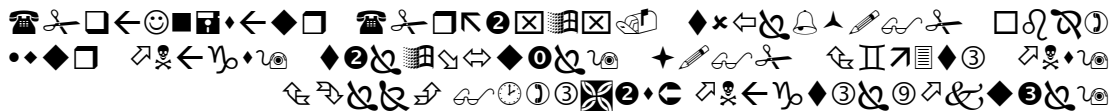
- 1) Dibunuh
- 2) Disalib
- 3) Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang
- 4) Diasingkan atau dibuang. Untuk kasus Indonesia bisa di penjara.³⁹

Sementara Dadang Hawari menyimpulkan bahwa, Allah SWT tidak akan mengampuni orang yang ingkar terhadap hukum Allah dan berbuat

³⁹ *Ibid*

kezaliman salah satu bentuk kezaliman adalah kekerasan seksual atau perkosaan.⁴⁰

Firman dalam surat an-Nisa' ayat 168, sebagai berikut:



Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni (dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan kepada mereka."⁴¹

Perkosaan pada hakekatnya adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa di luar keinginan korban. Menurut Mulyana W. Kusuma menyatakan, bahwa secara teoritik dengan mempergunakan rumusan hukum kriminologi perkosaan terdapat beberapa jenis, sebagai berikut:⁴²

1. Sadistic Rape

Perkosaan/pemeriksaan sadistik, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresifitas berpadu dalam bentuk yang merusak.

2. Angea Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.

3. Dononation Rape

⁴⁰ Dadang Hawari, *Dampak Seks Bebas terhadap Kesehatan Jiwa*, (Jakarta : Balai Penerbit FK UI, 2009). h. 64

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 15

⁴² Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, h. 46-47

Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan terhadap korban.

4. Setuktive Rape

Suatu pemerkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak.

5. Victim Preciptatied Rape

Yakni pemerkosaan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. Explotation Rape

Pemerkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

Keenam jenis perkosaan di atas mencerminkan perbedaan-perbedaan baik dalam jenis kekuasaan yang digunakan oleh pelaku atau motifasinya dalam melakukan kekerasan terhadap genetika seksual wanita.

3. Dampak terjadinya aborsi akibat pemerkosaan

Jika dilihat dari angka kematian ibu, berbagai studi menampilkan jumlah yang berkisar antara 300 sampai 800 per 100.000 kelahiran hidup. Seperti data pada tahun 1995 yang menyebutkan 373 per 100.000 dari kelahiran hidup, dan jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya. Dari angka tersebut kematian akibat aborsi karena pendarahan menempati posisi yang paling dominan,

sekitar 46,7 persen. Bahkan WHO menaksir dari 10 persen-50 persen kematian ibu diakibatkan oleh aborsi. Berarti setiap 100.000 kelahiran hidup sekitar 37-186 meninggal dunia secara sia-sia yang disebabkan karena aborsi.⁴³

Dampak aborsi tidak aman apapun bentuknya, karena yang paling menderita dari praktek ini adalah pihak perempuan, seperti:⁴⁴

- a. Perempuan menjadi korban dari fungsi reproduksi yang tidak terencana.
- b. Secara psikis, perempuan menerima beban mental berupa dihantui rasa berdosa, ketakutan, penyesalan dan sebagainya.
- c. Secara sosial, perlakuan aborsi terkadang harus menerima hukuman berupa kehidupan yang terisolir dari komunitas atau masyarakat.

Dalam tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan (yang mengakibatkan kehamilan ataupun tidak), korban mengalami beban psikologis yang berupa trauma seumur hidup.⁴⁵

Seorang wanita yang menjadi korban perkosaan disamping menerima dampak dari perkosaan itu sendiri ia juga menerima dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan (jika dari perkosaan tersebut sampai menyebabkan

⁴³ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, h. 43

⁴⁴ Maria Ulfah Anshor, Aborsi, antara fakta dan Norma, <http://ceria.bkkbn.go.id/referensi/substansi/detail/95>. 21 Mei 2005

⁴⁵ [http://www.jawapos.co.id/index.php?act= ... &id=172850](http://www.jawapos.co.id/index.php?act=...&id=172850), Wanita Korban Perkosaan Dilegalkan aborsi, 21 Mei 2005

kehamilan) maka dampak yang ia alami semakin bertambah berat. Dampak-dampak dari aborsi akibat perkosaan tersebut diantaranya:⁴⁶

- a. Dari aspek psikologis seperti trauma dari kekerasan seksual (perkosaan) yang membayang-bayangi.
- b. Dari aspek psiko-sosial seperti pengucilan dari pergaulan, komentar negatif dari masyarakat, dikeluarkan dari sekolah, dianggap sebagai aib dan sebagainya yang merugikan masa depan korban.

Dalam hal tindakan aborsi ini seharusnya wanita korban perkosaan wajib mendapatkan perlindungan hukum jika melakukan tindakan aborsi. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan atas bayi yang tidak diinginkan ini bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Pernyataan ini dikeluarkan oleh A.A. Oka Dhermawan pada sidang disertasinya untuk meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Jayabaya.⁴⁷

Dia menjelaskan, kasus aborsi pada wanita hamil akibat perkosaan memiliki 'karakteristik' tersendiri. Misalnya saja jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan pasca perkosaan, ada korban yang menutup diri dari lingkungannya, ada yang mengalami stress, bahkan ada yang ingin bunuh diri.⁴⁸

⁴⁶ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi*, h. 75-79

⁴⁷ [http://www.jawapos.co.id/index.php?act= ... &id=172850](http://www.jawapos.co.id/index.php?act=...&id=172850), Wanita Korban Perkosaan Dilegalkan aborsi 21 Mei 2005

⁴⁸ *Ibid*,

Tidak dapat dipungkiri, bahwa aborsi memang merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Namun untuk kasus ini, Oka memiliki pertimbangan lain. Menurutnya, aborsi yang dilakukan korban perkosaan sebenarnya merupakan akibat kejahatan lain yang harus dilindungi. Dia memiliki alasan untuk hal ini.

Pertama, korban perkosaan secara natural ingin menentukan kediriannya yang telah menjadi korban. *Kedua*, mereka dalam keadaan trauma sehingga tubuh dan jiwanya tidak normal. Mengacu dari hal tersebut, Oka berpendapat tindakan aborsi yang dilakukan harus ditelaah lebih jauh lagi. Yang harus dilihat adalah apa penyebab seorang wanita melakukannya.⁴⁹

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi korban perkosaan harus bisa diterapkan dengan merujuk pada beberapa hukum yang berlaku. Diantaranya pasal 48 KUHP. Pasal ini mengemukakan adanya suatu dorongan kondisi dari pelaku tindak pidana (misalnya terdesak atau terjepit Santara dua kepentingan yang sama buruknya) sehingga aborsi dipilih sebagai satu-satunya jalan pembenaran atas tindakan yang harus dilindungi oleh hukum.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*,

⁵⁰ *Ibid*,

BAB IV

FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG

ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN

A. Latar Belakang munculnya Fatwa MUI No. 4 tahun 2005

Lahirnya fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang aborsi, menurut Majelis Ulama Indonesia dilatar belakangi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :¹

1. Bahwa ahir-ahir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntutan agama. Hal ini didasarkan kepada hasil penelitian pada Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia yang menemukan, bahwa pertahun rata-rata telah terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi tidak aman.²
2. Bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Indikasi ini, didasarkan pada data yang diperoleh oleh Badan WHO (*World Health Organization*) yang menyebutkan bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Sementara dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan

¹ MUI, *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975*, (Jakarta : Airlangga, 2011), hlm. 455.

² Lihat Budi utomo dkk. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 kota Besardan 6 kabupaten*. (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002), hlm. 7

70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman.³

3. Bahwa aborsi tersebut, telah menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi; apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi ini, didasarkan pada, adanya perbedaan yang pandangan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi sebelum *nasfkhur ruh* (peniupan ruh), meskipun persyaratan kebolehan aborsi karena *dhoruri* hanya berlaku pada usia janin sebelum 40 hari.
4. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

Aborsi di Indonesia menurut ahli demografi kesehatan masyarakat, lebih dari 1 juta bahkan ada yang mengatakan hingga 2 juta per tahun.⁴ Sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan aborsi yang dilakukan oleh remaja. Dan sebagian besar lagi dilakukan secara tidak aman karena tidak ada pelayanan aborsi legal di Indonesia.

Praktik aborsi (pengguguran kandungan) di Indonesia tetap tinggi. Tiap tahun mencapai 2,5 juta kasus. Data ini menurut Prof Dr H Jurnal Uddin PAK, belum termasuk kasus aborsi di jalur nonmedis (dukun).⁵ Menurutnya, penelitian pada beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan lembaga kesehatan

³ Lihat Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 224.

⁴ <http://suaramerdeka.com>, pada Rabu (19/10/2011).

⁵ <http://suaramerdeka.com>, pada Sabtu (23/2).

lainnya menunjukkan bahwa fenomena aborsi di Indonesia perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Dari penelitian WHO diperkirakan 20-60 persen aborsi di Indonesia adalah disengaja (*induced abortion*). Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia memperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi, 50 persennya terjadi di perkotaan. Kasus aborsi di perkotaan dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di pedesaan oleh dukun (84%). Klien aborsi terbanyak berada pada kisaran usia 20-29 tahun.

Perempuan yang tidak menginginkan kehamilannya tersebut, kata Jurnalis Uddin, dikarenakan beberapa faktor. Antara lain, hamil karena perkosaan, janin dideteksi punya cacat genetik, alasan sosial ekonomi, gangguan kesehatan, KB gagal, dan lainnya. Biasanya hamil karena perkosaan akan menderita gangguan fisik dan jiwa berat seumur hidup.⁶

Kondisi tersebut, didukung oleh kenyataan bahwa pelaku aborsi tidak hanya wanita yang sudah menikah akan tetapi juga dilakukan oleh kalangan wanita remaja. Lebih dari separuh atau 57% wanita pelaku aborsi adalah mereka yang berusia dibawah 25 tahun bahkan 24% dari mereka adalah wanita remaja berusia dibawah 19 tahun.⁷

Kasus aborsi tersebut, dari tahun 2008 hingga 2010 terus meningkat. Yang menjadi persoalan adalah 62 persen pelakunya melibatkan anak-anak di bawah

⁶ <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/02/25/2425/Kasus-Aborsi-25-Juta-Setahun>

⁷ http://aborsi.org/tanya_jawab.html

umur. Bahkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) memperkirakan, selama kurun 2008 - 2010, kenaikan angka kasus aborsi rata-rata 15 persen setiap tahun. Pada 2008 ditemukan ada dua juta jiwa anak korban aborsi. Tahun berikutnya, anak korban aborsi bertambah 300 ribu jiwa. Pada 2010, bertambah lagi 200 ribu jiwa.⁸

Secara lebih jelas, hasil penelitian yang dilakukan oleh UI tentang siapa yang melakukan aborsi pada 9 kota di Indonesia dengan kategori karakteristik perempuan, yaitu :⁹

- ◆ Usia diatas 30 tahun: 58%
- ◆ Usia antara 20-30 tahun: 39%
- ◆ Usia dibawah 20 tahun: < 3%
- ◆ Sudah menikah: 87%
- ◆ Belum menikah: 12%
- ◆ Ibu rumah tangga: 48%
- ◆ Bekerja: 43%
- ◆ Pelajar : 7%
- ◆ Lainnya : 2%

Selain itu, MUI juga menyadari bahwa tindak aborsi di Indonesia sendiri masih menimbulkan sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak yang pro kepada tindak aborsi lebih menekankan pada aspek kesehatan (*Abortus*

⁸ <http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=85795>

⁹ Budi utomo dkk, *Op, Cit.* hlm. 8

Provocatus Medicalis), misalnya tindak aborsi yang terpaksa boleh dilakukan dalam upaya menyelamatkan nyawa ibu sang bayi. Bila tidak dilakukan tindak aborsi maka nyawa ibu dengan anak tidak dapat diselamatkan atau karena ibu mengidap penyakit jantung atau penyakit lainnya yang berbahaya bagi ibu.

Dari kondisi tersebut di atas, maka MUI merasa perlu untuk membuat fatwa yang menegaskan tentang hukum aborsi sekaligus hal-hal apa saja yang menjadi kebolehan dalam melakukan tidak aborsi.

B. Deskripsi Fatwa MUI dan Dasar Penetapan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005

Adapun isi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, adalah sebagai berikut : ¹⁰

Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*). Implantasi adalah suatu proses melekatnya *blastosis* ke *endometrium uterus* diawali dengan menempelnya embrio pada permukaan *epitel endometrium*, menembus lapisan epitelium selanjutnya membuat

¹⁰ MUI, *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975*, hlm. 455 – 463. lihat juga di <http://www.mui.or.id>. Fatwa MUI No.4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

hubungan dengan sistem sirkulasi ibu. implantasi pada manusia terjadi 2-3 hari setelah telur yang telah dibuahi memasuki uterus atau 6-7 hari setelah terjadinya fertilisasi dimana ditandai dengan menempelnya blastosis pada epitel uterus.¹¹

Dalam sistem reproduksi manusia, implantasi merupakan proses yang harus dilalui, dan keberhasilan proses ini membutuhkan kesiapan, koordinasi dan interaksi yang terus-menerus antara embrio dan ibu. Endometrium banyak mengandung sel-sel stroma terutama disekitar pembuluh darah mengalami hipertrofi keadaan ini sangat baik untuk implantasi dan pertumbuhan dari hasil konsepsi.

Implantasi didahului dengan bertambahnya *permiabilitas kapiler stroma uterus* pada tempat blastosis akan menempel, ini menimbulkan hipotesa bahwa isyarat dari embrio mungkin merupakan faktor pencetus yang penting.

Pengetahuan dasar tentang implantasi pada manusia masih banyak yang belum diketahui dengan jelas, ada beberapa informasi berdasarkan pada percobaan binatang dengan spesies yang lebih rendah. Penelitian mengenai hal tersebut telah banyak dilakukan namun belum dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai proses implantasi tersebut.¹²

¹¹ Cunningham F.G, Mac Donald P.C., Grant N.F., et al. The Endometrium and Decidua. In William Obstetrics, 2000, 21st edition :65-83

¹² Creasy RK. Resnik R., et al. The Immunology of Pregnancy. In Maternal-Fetal Medicine, 1999, 4th edition :72-89

Pada endometrium manusia semua komponen sistem interleukin-1 (IL-1) dapat dideteksi dengan pemeriksaan secara immunohistokimia baik pada embrio praimplantasi maupun pada endometrium di semua fase siklus menstruasi, dimana konsentrasinya meningkat pada fase luteal pada saat sekitar impantasia. IL-1 dan interleukin-1 reseptor tipe I (IL-IRtI) secara signifikan meningkat pada fase luteal.¹³

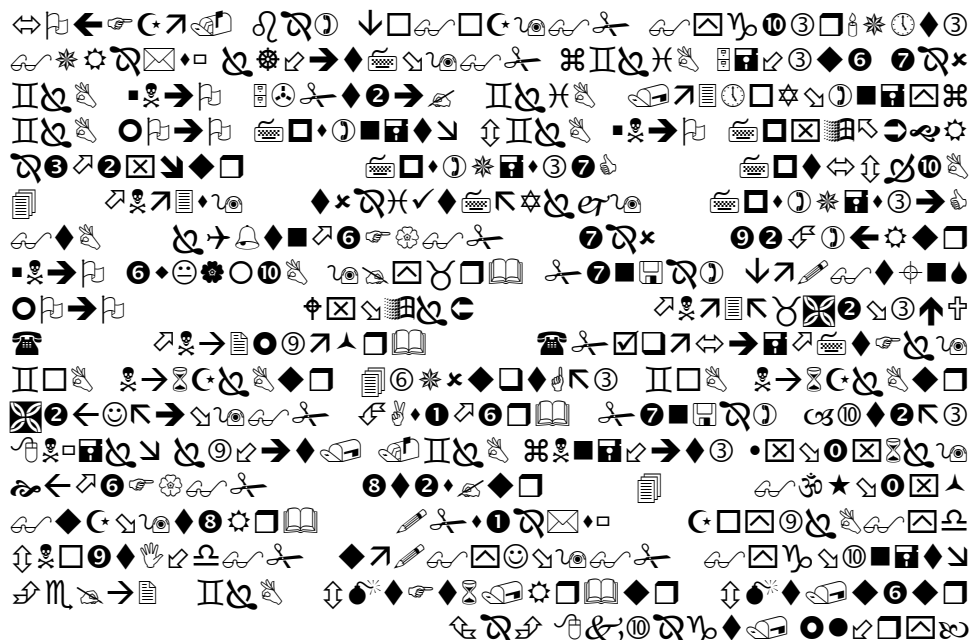
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1). Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 - 2). Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1). Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

¹³ Speroff L, Glass RH, Kase NG., Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility 5th ed. Baltimore : Williams and Wilkins, 1994: 67-8



"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (69). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina".

d. Surat al-Hajj: 5;



"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah".

e. Surat al-Mu'minun: 12-14;

وَإِذْ نَسُفْنَا السَّمَاءَ سُمْفًا مَسْمُومًا وَإِذْ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حُمْلًا ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُ كَبَدًا فَاكْشَدًا وَإِذْ جَعَلْنَا السَّمَاءَ رَكُودًا وَكَوْكَبًا زُجْجًا وَإِذْ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حُمْلًا ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُ كَبَدًا فَاكْشَدًا وَإِذْ جَعَلْنَا السَّمَاءَ رَكُودًا وَكَوْكَبًا زُجْجًا

"Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik".

2. Hadis:

يُجْمَعُ خَلْقُهُ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَكُونُ يَبْنَعُ إِلَيْهِ يَنْفُخُ فِيهِ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ رَرْقُهُ أَوْسَعِيدَ

()

"Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya da dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah selama itu pula (40 hari); kemudian menjadi mudhgah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan

dikatakan kepadanya: *Tulislah amal, rizki dan ajal, serta celaka atau bahagia; kemudian ditiupkan ruh kepadanya*".¹⁴

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدٌ.....

Dua orang dari suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melapor kepada Rasulullah. Lalu beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan) budak laki-laki atau perempuan.....¹⁵

....
Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (HR. Ibnu Majjah)

3. Kaidah fikih:

"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan "

تَبِيحُ

"Kemadaratan membolehkan yang madarat (dilarang)"

"Kebutuhan terkadang dapat menduduki keadaan darurat".

Apabila dengan kehamilan justru menimbulkan *mafsadat* atau menimbulkan *madlarat* lebih besar, sementara kebutuhan untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) lebih dapat mendatangkan *mashlahat* (manfaat), maka berdasarkan kaidah fiqh di atas aborsi boleh dilakukan.

Aspek *madlarat* tersebut diantaranya adalah kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini

¹⁴ HR. Imam Bukhori dari Abdullah No. 2969.

¹⁵ Abdullah bin 'Abdur Rahman al-Bassan, *Tawdhih al-Ahkam min Bulughul Maram*, Juz V. hlm. 185.

didasarkan pada alasan bahwa faktor fisik dan psikis tidak dapat dipisahkan, keduanya harus menjadi ukuran dalam mempertimbangkan bahaya atau tidaknya seseorang. Termasuk di dalamnya seluruh situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang, terjadinya peristiwa pemerkosaan.

Akan tetapi, kebutuhan tersebut tidak boleh menyimpang dari salah satu dari 5 tujuan prinsipil *Maqashid as-Syariah* (Tujuan-tujuan Syariah). Kelima tujuan prinsipil itu adalah: melindungi Agama (*Hifdzu Dien*), Melindungi Jiwa (*Hifdzu Nafs*), Melindungi Akal (*Hifdzu 'Aql*), Melindungi Kehormatan dan Nasab (*Hifz Nasl*), dan melindungi Harta Benda (*Hifdzu Maal*). Artinya, jika kebutuhan untuk melakukan aborsi tidak menimbulkan manfaat lebih besar dari pada harus mengandung, maka hukum aborsi menjadi haram.

Misalnya, seorang pemuda lajang yang pada suatu saat harus menikah, sebab jika tidak segera menikah dia takut terseret kepada perbuatan maksiat, bahkan perzinaan. Pada saat itu dia tidak mempunyai biaya kecuali uang tabungan haji. Dalam hal ini ia boleh untuk menggunakan uang tabungan haji untuk biaya pernikahannya.

Selain itu, jika dilihat dari kebolehan melakukan aborsi akibat perkosaan dan tidak, merupakan dua kondisi yang sama-sama membahayakan, dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa kaidah fikih, antara lain:

Pertama, “Bahaya itu menurut agama harus dihilangkan (*al-dllarar yuzaalu syar'an*)”;

Kedua, “Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan (*al-dharar al-asyadd yuzaalu bi al-dharar al-akhaff*)” atau “Jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya (*Idza ta’aradlat al-mafsadataani ruu’iya a’dhamuhuma dlararan*)”;

Ketiga, “Keterpaksaan dapat memperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang (*al-dlaruraatu tubiihul mahdzuraat*)”;

Keempat, perubahan hukum Islam dapat dilakukan dengan adanya perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan kondisi, perubahan niat dan kultur atau adat (*taghayyir al-ahkam bitaghayyur al-azminah wal-amkinah wal-ahwal wan-niyaat wal- ‘awaaid*)”.¹⁶

Ada argumentasi klasik di kalangan ulama bahwa pencegahan atau mendahulukan prevensi (*syaddu al-dzari’ah*) lebih baik. Dalam hal hukum aborsi murni, melarang aborsi dianggap lebih aman, karena ada kekhawatiran kalau aborsi dibolehkan akan dijadikan sebagai peluang bagi pelaku seks di luar nikah mencari jalan keluar. Bila aborsi dibolehkan, maka sama dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perzinahan atau seks bebas.

Pertanyaannya adalah bagaimana fikih menjawab realitas yang sudah terjadi berupa tingginya angka aborsi tak aman yang jelas-jelas mengancam kematian?, apakah masih relevan menjawab dengan argumentasi preventif?.

¹⁶ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr (terkenal dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Juuziyyah). *‘Alaam al-Muwaqqi’iin ‘an Rabbi al-‘Alamiin*. (Cairo: Mathabi’ Al-Islam, 1980) jilid 3, hlm. 3

Pandangan tersebut nampak sangat tekstual karena hanya berorientasi pada teks tanpa melihat realitas sosial bahwa ada kondisi yang mengancam kematian perempuan yang perlu dijembatani supaya aborsi tak aman tidak terjadi. Di sinilah letak kesenjangannya antara teks fikih dan kenyataan di lapangan.

Argumentasi klasik tersebut terpatahkan dengan ditemukannya fakta bahwa dari jumlah rata-rata 2 juta kasus aborsi pertahun, 76.6% dilakukan oleh perempuan berstatus menikah.¹⁷ Penelitian terakhir oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (2003), 87% klien aborsi berstatus menikah.¹⁸ Mereka memutuskan aborsi ternyata ada sejumlah persoalan kemanusiaan yang mempengaruhinya. Beberapa faktor penentu di antaranya perkosaan dan incest, kegagalan alat kontrasepsi, kemiskinan, kesehatan fisik maupun mental dan sebagainya. Dari jumlah aborsi tersebut diperkirakan 10-50% nya berakhir dengan kematian ibu.¹⁹

Dari sudut pandang apapun fakta tersebut adalah merupakan problem sosial yang sangat memprihatinkan, harus dicarikan solusinya, tidak cukup hanya dengan wacana, etis atau tidak etis maupun kontroversi lainnya. Kita dihadapkan pada fakta yang sudah ada di depan mata, menuntut siapapun untuk segera bersikap dan bertindak. Terlepas dari takdir, kesakitan dan kematian akibat aborsi tak aman tersebut sesungguhnya dapat cegah setidaknya dikurangi.

¹⁷ Budi Utomo. Op cit, hal. 30

¹⁸ Ninuk Widyantoro. 2003. *Pengakhiran Kehamilan Tak Diinginkan yang Aman Berbasis Konseling*. Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan.

¹⁹ WHO dalam Gulardi Wignyosastro. *Masalah Kesehatan Perempuan Akbat Reproduksi*, Makalah Seminar Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, PP Fatayat NU dan Ford Foundation, Jakarta, 1 September 2001

Pendapat-pendapat para ulama mengenai aborsi tersebut dapat dijadikan sebagai ilustrasi bahwa karakter fikih adalah dinamis dan realistis dapat dikaji secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan hukum Islam (*maqashid al-ahkam al-syar'iyyah*), sebagaimana dikatakan Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan cara yang harus dilaluinya dengan menggunakan akal manusia.²⁰

Dalam hal ini, yang terpenting kuncinya adalah fikih itu harus bisa mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan secara proporsional terhadap kehidupan manusia. Prinsip-prinsip di dalam kaidah pembentukan hukum Islam tersebut dalam praktik hampir sama dengan prinsip-prinsip dasar moral dalam ilmu filsafat, yang harus berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu ;

Pertama, prinsip sikap baik yaitu bersikap positif dan baik. Sikap ini menjadi kesadaran inti utilitarianisme bahwa kita harus mengusahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan kita dengan tanpa merugikan pihak lain;

²⁰ Ash Shiddieqy, Hasbi. Op cit, hal. 177.

Kedua, prinsip keadilan yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan haknya masing-masing. Prinsip ini menuntut kita agar tidak mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak orang lain.;

Ketiga, prinsip hormat terhadap diri sendiri, yaitu selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri.

Namun pemahaman-pemahaman mengenai batasan bahaya (*dlarurat*) tersebut dalam hal aborsi seringkali terjebak pada ukuran-ukuran fisik, padahal dalam konteks manusia antara fisik dan psikis itu tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang kondisi fisiknya sehat belum tentu secara psikis sehat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, faktor fisik dan psikis tidak dapat dipisahkan, keduanya harus menjadi ukuran dalam mempertimbangkan bahaya atau tidaknya seseorang. Termasuk di dalamnya seluruh situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang, menjadi perantara atau penyebab yang mengantarkan (*washilah*) terjadinya kondisi darurat menjadi bagian yang juga harus dianalisa dalam menetapkan hukum.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai dasar pembentukan hukum tidak dapat dipisahkan dengan tujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan*³⁰⁵¹ terhadap ibunya, karena ibu merupakan induk (*al-ashl*) dari janin sehingga harus dipertahankan dan harus dilindungi. Ibu telah memiliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarganya maupun masyarakatnya. Sementara janin belum memiliki tanggung jawab apapun. Dalam hal ini sifatnya memang relatif sekali, tidak bisa digeneralisir secara hitam putih karena kondisi yang dianggap

darurat dan masalahat bagi seseorang belum tentu sama dengan kondisi darurat dan masalahat bagi orang lain.

C. Pandangan Para Ulama' tentang Aborsi

Pemeriksaan adalah suatu tindakan kriminal disaat si korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin, di luar kemauannya sendiri. Pemeriksaan meninggalkan luka bagi para korbannya, yang tidak diketahui kapan bisa diobati. Belum hilang stress akan kejadian itu (pemeriksaan) para korban pemeriksaan harus dihadapkan dengan masalah yang delimitis, *Pertama*, masalah menghentikan kehamilan tersebut dengan jalan melakukan aborsi dan yang *kedua*, meneruskan kehamilan hingga anak itu lahir dan membesarkan anak meskipun itu merupakan beban berat bagi wanita (korban pemeriksaan) karena anak tersebut adalah anak hasil dari pemeriksaan.

Namun, keputusan untuk melakukan aborsi itu bukanlah hal yang ringan, selain karena stigma sosial yang akan membayang-bayangi para korban (pelaku aborsi), apabila aborsi dilakukan di negara yang tidak melegalkan atau melarang tindak aborsi maka berbagai aspek harus dipertimbangkan dari aspek agama, hukum, pelayanan medis ataupun dari aspek moral.

Semua orang menginginkan terciptanya generasi yang cerdas intelektual, emosional dan spiritual. Oleh karena itu realita tersebut menjadi tanggung jawab

semua pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan negara untuk mensinergiskan upaya dalam mencetak generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan.

Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap nyawa atau jiwa manusia sudah dimulai ketika manusia masih berbentuk janin, yaitu dengan mengharamkan penguguran kandungan (aborsi). Kecuali apabila ada faktor yang benar-benar untuk mengharuskan pengugurkan janin tersebut, seperti dikhawatirkan sang ibu akan meninggal atau karena sebab lainnya.

Perbuatan aborsi dapat dilakukan apabila aborsi dilakukan sebelum fase ditiupkannya ruh (120 hari/4 bulan) sebagaimana beberapa pendapat ulama seperti mazhab Syafi'i bahwa diperbolehkan pada waktu masih *nutfah*, *'alaqah*, *mudgah* dengan alasan sebelum usia tersebut janin belum berbentuk manusia. Misalnya yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan jika *nutfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilah*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).²¹

Begitu pula mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa aborsi sebelum terjadinya penyawaan hukumnya makruh, apalagi kalau tidak ada alasan yang jelas, karena itu meninggalkan lebih baik. Adapun yang dijadikan alasan untuk melakukan aborsi adalah harus berkaitan dengan kemaslahatan, baik untuk ibu maupun janinnya.

²¹ *Ihya' `Ulum al-Din*, tahqiq Sayyid `Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), juz II, hlm. 67

Demikian mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa aborsi dibolehkan sebelum terjadinya penciptaan atau sebelum janin berusia 40 hari dan diharamkan apabila setelah usia tersebut. Adapun menurut ulama' kontemporer seperti Muhmud Syaltut dan Yusuf Qardawi hukum penguguran janin (aborsi) itu adalah haram hukumnya, sejak bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya akan muncul makhluk baru dan menetap di dalam rahim. Akan tetapi mereka membolehkan penguguran janin dalam keadaan terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan nyawa si ibu.²²

Berkaitan dengan masalah aborsi akibat pemerkosaan, MUI (majelis ulama Indonesia) membolehkan untuk melakukan tindak aborsi. Dengan alasan, usia janin belum mencapai 40 hari, menyakini janin dalam kandungan belum memiliki ruh, adanya kekhawatiran terhadap masa depan anak hasil pemerkosaan (keadaan hajat atau dharurat).

Persoalannya kemudian muncul adalah mengenai batasan darurat, meskipun secara agama (*syar'i*) sangat jelas yaitu apapun yang dapat mengancam kebinasaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*ad-dlaruuriyyat al-Khamsah*) disebut darurat. Artinya, segala situasi dan kondisi apapun yang dapat mengantarkan atau mengakibatkan pada rusaknya lima perkara tersebut dapat dilakukan meskipun harus bertentangan dengan hal-hal yang dalam situasi normal dilarang, misalnya memakan sesuatu yang diharamkan untuk obat diperbolehkan.

²² Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, h. 81

Dalam hal ini, ketika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat bahayanya paling ringan, sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

يَرْتَكِبُ أَخْفَىَ الضَّرَرَيْنِ لَا تَقَاءَ أَشَدَّهُمَا

“Yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan”.²³

Namun pemahaman-pemahaman mengenai batasan bahaya (*dlarurat*) tersebut dalam hal aborsi seringkali terjebak pada ukuran-ukuran fisik, padahal dalam konteks manusia antara fisik dan psikis itu tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang kondisi fisiknya sehat belum tentu secara psikis sehat, begitu juga sebaliknya.

Oleh karena itu, faktor fisik dan psikis tidak dapat dipisahkan, keduanya harus menjadi ukuran dalam mempertimbangkan bahaya atau tidaknya seseorang. Termasuk di dalamnya seluruh situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang, menjadi perantara atau penyebab yang mengantarkan (*washilah*) terjadinya kondisi darurat menjadi bagian yang juga harus dianalisa dalam menetapkan hukum.

Dalam konsep *mashlahat*, fiqh mempertimbangkan tiga tingkatan terkait dengan konsep kemashlahatan tersebut, yaitu : *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala

²³ Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ushul Fiqh)*. (Bandung: Penerbit Risalah, 1985), hlm. 151

prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat dalam kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat *dharuriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul peringkat *tahsiniyyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.²⁴

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essential bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang essential itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam batas tidak sampai terancam eksistensinya kelima pokok itu. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas.²⁵

Berbeda dengan kelompok *dharuriyyat* kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang essential, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya,²⁶ tidak terpeliharanya tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukalaf. Kelompok ini erat hubungannya dengan rukhsah atau keringanan dalam fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam

²⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz.II, hlm. 12 - 23

²⁵ *Ibid*, hlm. 10

²⁶ *Ibid*.

kelompok *tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang menunjang martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kebutuhan.²⁷

Pada hakikatnya baik kelompok *dharuriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang tersebut diatas. Hanya saja peringkat kepentinganya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan kebutuhan primer, yang kalau kelima kelompok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu.. kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelima hal dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplememter, pelengkap.

Ketika *kemaslahatan* yang satu berbenturan dengan kemasalahatan yang lainnya. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *dharuriyyat* harus didahulukan pada peringkat kedua *hajiyyat* dan peringkat ketiga *tahsiniyyat*.²⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga manakala kemaslahatan peringkat pertama terancam

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11

²⁸ Al-Syathibi, *op.cit.*,h.12

eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan dimaksud harus berupa makanan yang halal. Sementara saat itu ia tidak mendapatkan makanan yang halal, dan kalau ia tidak makan maka ia akan mati, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makanan dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat* dari pada peringkat *hajiyyat*.

Begitu pula halnya dalam peringkat *tahsiniyyat* berbenturan dalam peringkat *hajiyyat* harus didahulukan dari pada *tahsiniyyat*. Misalnya, melaksanakan sholat berjama'ah termasuk peringkat *hajiyyat* sedangkan adanya imam yang shalih tidak *fasiq* termasuk peringkat *tahsiniyyat*. Jika dalam satu kelompok umat islam tidak ada imam yang memenuhi persyaratan tersebut maka dibenarkan berimam kepada imam yang *fasiq*, demi menjaga sholat berjama'ah yang bersifat *hajiyyat* itu didahulukan memelihara agama. Dalam hal ini jihad pada jalan Allah SWT didahulukan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwanya.

Dalam menyelesaikan adanya benturan-benturan pada tingkat *dharuriyyat* ini para pakar ushul fiqh menetapkan kaidah yang berbunyi : “*Kemudharatan*

*yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil”*²⁹

Dapat dilihat selanjutnya bila kelima bentuk *dharuriyyat* itu berbenturan, prioritas pertama yang harus dipelihara, yaitu agama kemudian jiwa, setelah itu keturunan, serta akal dan terakhir harta. Untuk membenarkan tindakan mengambil resiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih utama itu ulama menggunakan kaidah : “*dharurat itu membolehkan larangan* “.³⁰

Untuk mencapai pemeliharaan terhadap lima unsur yang pokok secara sempurna maka ketiga tingkatan ini tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan komentar al-Syatibi : “jika ketentuan tersebut telah dipahami, maka orang yang berakal tidak ragu bahwa perkara yang bersifat *hajiyyat* adalah bagian yang berkisar pada perkara-perkara *dharuriyyat* yang merupakan tujuan pokok. Begitu juga perkara-perkara yang bersifat *tahsiniyyat* adalah bagiannya, sebab ia pelengkap bagi *hajiyyat*, sementara *hajiyyat* itu pelengkap *dharuriyyat*. Ini berarti *tahsiniyyat* merupakan pelengkap *dharuriyyat*. Karena itu secara otomatis tujuan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyyat*) ini adalah bagian yang primer (*dharuriyyat*) dan sebagai pelengkap.”³¹

Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai dasar pembentukan hukum tidak dapat dipisahkan dengan tujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* terhadap

²⁹ Abu Zahrah., *Ushul al-Fqh*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 127

³⁰ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majjalah al-Ahkam Adliyah*, (Beirut : Dar Maktab Ilmiyah, t.t), materi 21

³¹ Al-Syathibi, *op.cit.*, h. 17-18

ibunya,³² karena ibu merupakan induk (*al-ashl*) dari janin sehingga harus dipertahankan dan harus dilindungi. Ibu telah memiliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarganya maupun masyarakatnya. Sementara janin belum memiliki tanggung jawab apapun. Dalam hal ini sifatnya memang relatif sekali, tidak bias digeneralisir secara hitam putih karena kondisi yang dianggap darurat dan maslahat bagi seseorang belum tentu sama dengan kondisi darurat dan maslahat bagi orang lain.

Tetapi di situlah sebenarnya justru terletak kejelasan dari fikih, bersifat relatif, memiliki fleksibilitas, sangat tergantung pada situasi dan kondisi bahkan motivasi (*niat*) yang melatar belakangi, sebagaimana kaidah klasik yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di atas. Kaidah lain menyebutkan bahwa hukum sangat tergantung pada adanya 'illat dan tidak adanya 'illat (*al-hukm yaduuru ma'a al-'illah wujuudan wa-'adaman*).³³

Atas dasar ini lah kemudian, MUI menetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebaikan dan kemanfaatan (*mashlahat*) dan bahaya (*madllarat*) baik secara fisik maupun psikis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi aborsi akibat pemerkosaan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan untuk menghindari terjadinya kematian ibu akibat aborsi tak aman. Pengertian alternatif di sini adalah sebagai pilihan terakhir bagi perempuan yang situasi dan kondisi fisik maupun psikisnya memang

³² Pengertian maslahat adalah mengambil kemanfaatan dan menolak bahaya (*jalbul manfa'ah wa daf'ul madlaarah*)

³³ Sulaiman, *Jaml Fath Al-Wahab* (Cairo: Daar Al-Ihya, tt), jilid 4, hal. 183.

tidak memungkinkan kalau kehamilannya dilanjutkan. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan ukuran-ukuran yang ditentukan oleh perempuan yang bersangkutan bukan oleh pihak lain termasuk suami atau keluarganya.

Di dalam fatwanya, MUI mendasarkan pada pendapat Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* : bahwa jika sperma (*nuthfah*) sudah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum didalam rahim dan sudah siap menerima kehidupan (*isti'dad li qabul al-hayah*), maka apabila merusaknya adalah dipandang sebagai tindak pidana.³⁴

Secara lebih detail seorang Ulama Al-Azhar menyimpulkan tentang hukum aborsi sebagai berikut ;

Jika aborsi dilakukan sebelum *nafkhi ar-ruh*, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha`. *Pertama, boleh (mubah) secara mutlak*, tanpa harus ada alasan medis (`uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi –walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. *Kedua, mubah karena adala alasan medis (`uzur) dan makruh jika tanpa `uzur*; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. *Ketiga, makruh secara mutlak*; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. *Keempat, haram*; ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan `azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. Jika aborsi dilakukan setelah *nafkhi ar-ruh* pada janin, maka semua pendapat fuqaha` menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat `uzur; perbuatan itu

³⁴ Lihat Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, tahqiq Sayyid 'Imrab (Kairo : Dar al-Hadits, 2004), Juz. II. hal. 67

diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha` disebut dengan ghurrah.³⁵

Sementara menurut Syaikh 'Athiyyah Shaqr, Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar, mengatakan :

Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurut saya, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinahan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinahan).³⁶

Menurut KH. Ali Musthofa Ya'kub, bahwa fatwa kebolehan aborsi di sana adalah karena adanya darurat. *Keadaan darurat* adalah perempuan hamil yang menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Juga kehamilan dalam keadaan di atas mengancam nyawa si ibu. Sementara itu, *kategori hajat* mengandaikan janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan dan kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. "Usia kandungan tidak boleh lebih dari 5 pekan".³⁷

³⁵ *Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.: Mathba`ah al-Mushhaf al-Syarif, t.th.), juz II, hlm. 256 :

³⁶ Syaikh 'Athiyyah Shaqr, *ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, (Cairo : Dar al-Ghad al-'Arabi, t.th), juz IV, hal. 483.

³⁷ Lihat pernyataan KH. Ali Musthofa Ya'kub, dalam www.detik.com. 24/01/09, ketika mengomentari Fatwa MUI No. 4. 2005.

Namun demikian, menurut The Wahid Institute, apa yang dilakukan oleh MUI tersebut kurang sesuai dengan kondisi saat ini, ketika aborsi di Indonesia menurut penelitian Dr. Azrul mencapai 2,3 juta per tahun.³⁸ Sementara menurut Maria Ulfah, pelaku aborsi tersebut "Sebagian besar dilakukan oleh ibu rumah tangga," jelas Maria Ulfah Anshor dalam bukunya yang bertajuk *Fikih Aborsi; Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*.

Bahkan seorang Nyai pesantren di Jawa Timur berani mengusulkan aborsi kepada anak didiknya yang korban *incest* (pemeriksaan). Hal ini menurutnya, Imam Hanbali membolehkan,³⁹ jelasnya kepada *the WAHID Institute* (26/03/09). Dalam pandangan ulama Hanbali, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging atau sebelum 40 hari karena belum berbentuk anak manusia dengan mempertimbangkan kondisi ibu. Korban, ketika fatwa MUI lahir pada 2005, sudah menanjak remaja—padahal ia diaborsi ketika umurnya baru 11 tahun.

D. Analisis terhadap Fatwa MUI No. 4 tahun 2005

Melindungi hak hidup janin adalah argumentasi yang dipakai untuk mendukung pendapat bahwa aborsi bagaimanapun bentuk dan prosesnya adalah perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana pendapat Muhmud Syaltut dan Yusuf Qardawi hukum penguguran janin (aborsi) itu adalah haram hukumnya, sejak

³⁸ Lihat Nawala, *Jurnal The Wahid Institute*, No. 8/TH. III/PEBRUARI - APRIL 2009

³⁹ *Ibid*

bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang dari keduanya akan muncul makhluk baru dan menetap di dalam rahim.

Persoalannya adalah benarkah janin memiliki hak hidup? Pertanyaan ini menggiring pada perdebatan berikutnya mengenai kapan janin dapat dikategorikan sebagai manusia.

Membahas hal ini, menarik apa yang dipaparkan oleh CB Kusmaryanto, Dosen Bioetika di Pascasarjana Sanata Dharma Yogyakarta. Menurutya, perdebatan mengenai kapan manusia terbentuk, dahulu adalah perdebatan mengenai *ensoulment*, masuknya jiwa ke dalam janin. Menurut Embriologi Aristotelian, jiwa masuk badan janin laki-laki pada hari ke-40 dan 90 hari untuk perempuan. Selain itu, ada pula yang berpendapat setelah umur 14, 30, 90 hari, bahkan 120 hari. Saat ini, pemikiran tersebut ditentang keras oleh embriologi modern yang membuktikan bahwa kehidupan manusia langsung dimulai seusa proses pembuahan.⁴⁰

Menurutnya, fakta-fakta baru embriologi modern seharusnya mengubah pandangan mengenai aborsi. Mungkin selama ini ada yang menyetujui aborsi karena percaya, hidup manusia baru dimulai 14 hari, atau 40 hari, atau 120 hari. Data ini, lanjutnya, sangat lemah karena tidak didukung data ilmiah embriologi modern. Oleh karena manusia hidup sejak proses pembuahan usai, maka ia mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Hak hidup, lanjutnya, adalah hak

⁴⁰ Lihat penjelasan mengenai prosesnya dalam CB. Kusmaryanto, "Aristoteles dan Aborsi", Kompas Cyber Media (<http://www.kompas.com>), Sabtu, 27 Agustus 2005

yang paling dasar, mendasari semua hak asasi lainnya. Tanpa hidup, manusia tak ada dan tak mempunyai hak asasi.⁴¹

Pernyataan CB. Kusmaryanto ini juga didukung oleh laporan sebuah kelompok yang terdiri dari 220 dokter terkemuka dan para guru besar kepada Dewan Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Laporan yang diserahkan pada bulan Oktober 1971 itu menunjukkan bahwa siklus pembentukan pribadi manusia terjadi saat pembuahan. Laporan ini merupakan penemuan penting embriologi, fetologi, genetika, perinatologi dan biologi tentang terbentuknya kepribadian manusia.⁴²

Selain argumentasi di atas, Frederica Mattewes-Green, memberikan sanggahan-sanggahan kepada alasan-alasan seputar status kemanusiaan janin yang diajukan kelompok pro-aborsi. Ketakutan dan ketidaksiapan perempuan untuk memiliki anak seringkali menjadi alasan aborsi. Tidak diinginkannya kehadiran anak membuat janin tak dianggap sebagai manusia. Menurut Mattewes, jika manfaat dari keberadaan seseorang bergantung pada seseorang yang lain, maka kita boleh dengan sekehendak hati meniadakan anak-anak, darah daging kita sendiri yang tidak memberikan kebahagiaan bagi kita. Seringkali pula perkiraan bahwa anak akan terlahir cacat menjadi alasan aborsi. Menurut Mattewes, para penyandang cacat mungkin gemetar mendengarnya. Jika diketahui ketidaknormalan mereka sebelum mereka lahir, kita mungkin akan

⁴¹ *Ibid*

⁴² Kardinal Sin, "Apa Itu Aborsi?", <http://www.indocel.net>

membuat mereka tidak terlahir ke dunia sehingga mereka tidak mengalami kehidupan yang jauh dari bahagia. Alasan aborsi bahwa anak akan mengalami penderitaan—seperti anak yang lahir akibat perkosaan—juga disanggah Mattewes. Dengan alasan ini, berarti kita menegaskan kekuatan si penyiksa dan mengesampingkan harapan dari mereka yang percaya bahwa masa lalu dapat dilupakan. Dengan itu semua, Mattewes memandang bahwa mempersepsikan janin sebagai bukan manusia berarti merendahkan martabat janin hanya demi mencari-cari alasan untuk aborsi. Kasus kehamilan di luar nikah, menurut Mattewes, barangkali memang memberatkan wanita—karena tanpa bapak yang bertanggung jawab. Namun, bukan berarti si wanita dapat melakukan hal yang sama—menghapus tanggung jawab dengan menggugurkan kandungannya.⁴³

Masalah aborsi memang sangat dilematis. Meskipun demikian, keamanan dan keselamatan ibu, nampaknya terlalu ekstrem untuk secara diametral diperhadapkan dengan kehidupan janin. Keselamatan dan keamanan ibu memang harus dipikirkan tetapi kenyataan bahwa problem aborsi bukan hanya problem medis dan psikologi perlu juga dipertimbangkan. Mengapa perempuan melakukan aborsi? Secara umum, bisa dijawab karena kehamilannya tidak diinginkan. Mengapa perempuan tidak menginginkan kehamilannya?

Jawaban untuk pertanyaan yang terakhir inilah yang melibatkan problem-problem lain yang ada di masyarakat, seperti pendidikan, sosial, budaya,

⁴³ Pendapat ini dikutip dari majalah Get Fresh dalam “Bukan Sekedar Onggokan Daging”, dalam <http://www.aborsi.org>

ekonomi, politik dan pelayanan kesehatan. Pengetahuan masyarakat yang rendah seputar problem reproduksi membuat ketidaktahuan mereka menjadi penyebab aborsi. Kejahatan budaya terhadap perempuan mengancam ketahanan fisik-psikisnya serta membuat aborsi menjadi satu-satunya pilihan. Belum lagi problem kemiskinan dan rendahnya pelayanan kesehatan.

Persoalan aborsi bukan hanya persoalan perempuan. Meskipun pemilik dan penguasa tubuh adalah perempuan, tetapi fungsi reproduksi tubuh perempuan memiliki efek-efek sosial yang tidak sederhana. Sehingga persoalan aborsi bukan persoalan sederhana. Mengembalikan masalah aborsi pada perempuan menafikan kompleksitas permasalahan yang melatarbelakanginya dan tidak akan mengatasi masalah. Aborsi merupakan problem sosial yang seharusnya menjadi keprihatinan semua pihak sehingga dicari solusi yang tidak parsial.

Dalam hal ini, prinsip hormat pada kehidupan haruslah dikedepankan dan menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang diambil. Prinsip ini mendesak untuk segera diwujudkan manakala dihadapkan dengan kelompok tertentu yang tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan hidupnya dari ancaman orang lain. Tidakkah kehidupan janin dalam posisi rentan karena ia lemah tak bisa melawan, karena posisinya yang lemah ia bahkan dianggap hanya seonggok daging biasa yang bisa diiris dan dibuang kapan saja. Dalam kehidupan, prinsip ini seringkali diabaikan. Jangankan janin yang lemah, bahkan sesama manusia pun terjadi saling membunuh. Karena itu dalam kasus aborsi prinsip ini perlu kembali ditegaskan.

Prinsip hormat pada kehidupan mencakup di dalamnya kehidupan ibu dan kehidupan janin. Bagaimana membuat perempuan menginginkan kehamilannya itulah yang harus dicari solusinya. Tentunya, memecahkan persoalan ini tidak bisa hanya ditempuh melalui jalur hukum, tetapi harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, karena problem di sekitar aborsi bukan hanya problem struktur tetapi juga kultur. Menegaskan hak masing-masing tanpa melakukan perubahan pada bidang-bidang tersebut sama saja bohong dan tidak akan mengurangi angka aborsi.

Penulis kurang setuju bila aborsi dilegalkan, dengan pertimbangan, ketentuan tersebut tidak hanya menafikan hak hidup janin tapi juga kelangsungan hidup si ibu. Karena terbukti, aborsi, dengan cara aman sekalipun tetap mengandung resiko-resiko, langsung maupun tidak langsung, bagi perempuan yang melakukannya. Ancaman terhadap keselamatan fisik serta ancaman psikologis berupa sindrom pasca-aborsi (*pasca abortion syndrome*) menunjukkan bahwa aborsi bukan solusi terbaik. Meskipun demikian, pintu aborsi tidak harus ditutup rapat-rapat. Ada celah-celah tertentu yang perlu dibuka, misalnya bagi aborsi karena indikasi medis. Dalam kasus inilah aborsi harus dilakukan. Meskipun begitu indikasi medis yang dimaksudkannya harus benar-benar bisa dipastikan secara medis, apakah benar kehamilannya mengancam nyawa ibu. Dalam kasus seperti ini nyawa ibulah yang harus diprioritaskan, karena ibu sudah memiliki tanggung jawab dibanding janin.

Dalam RUU Amandemen dinyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi perempuan dari penghentian kehamilan tanpa persetujuan perempuan dan dengan cara yang tidak aman. Sedangkan aborsi yang aman hanya diizinkan untuk kehamilan dengan indikasi medis. Bagaimana bila tidak ada indikasi medis seperti kasus-kasus aborsi yang selama ini terjadi, padahal dalam realitasnya, terjadinya aborsi adalah karena kehamilan tak diinginkan, bisa karena kegagalan KB, korban perkosaan, malu, takut pada keluarga, takut tidak bisa melanjutkan sekolah. Apa langkah-langkah yang akan ditempuh negara padahal melihat tingginya angka aborsi dan besarnya resiko yang harus ditanggung menunjukkan bahwa aborsi sangatlah penting dan dibutuhkan bagi mereka.

Selain itu, dalam kasus aborsi anak pada umumnya dan khususnya aborsi akibat pemerkosaan, menurut penulis tindakan aborsi itu dilarang, didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka kegiatan (praktek aborsi) merupakan suatu pelanggaran atau penyimpangan terhadap pasal-pasal di atas, karena dalam ketiga pasal tersebut membahas tentang hak-hak anak yang harus diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan, seperti yang terdapat dalam pasal 45 ayat 1 bahwasanya hak anak yang berupa menjaga kesehatan dan merawat anak itu harus diberikan atau dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan.⁴⁴

⁴⁴ Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan lahirnya fatwa MUI tentang aborsi akibat pemerkoasaan adalah (1), Bahwa ahir-ahir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntutan agama, (2). Bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dan (3). Bahwa aborsi tersebut, telah menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi; apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu.
2. Dalil yang digunakan MUI untuk merumuskan Fatwa tentang Aborsi adalah Surat al-Hajj: 5; Surat al-Mu'minun: 12-14; Surat al-Furqan: 63-71; Surat al-An'am: 151, sedangkan kaidah fiqh yang digunakan adalah "*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*", "*Kebutuhan terkadang dapat menduduki keadaan darurat*", dan "*Kemadaratan membolehkan yang madarat (dilarang)*";

3. Berdasarkan prinsip-prinsip *kemashlahatan* dan *dhoruriyyah*, maka Ulama sepakat untuk membolehkan melakukan aborsi bagi korban perkosaan sebelum usia kandungan 40 hari.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat dan keluarga korban kekerasan seksual hendaknya tidak mengucilkan para korban kekerasan seksual (pemeriksaan) dan anak yang dilahirkan dari hasil pemeriksaan. Karena alasan dilakukannya aborsi akibat pemeriksaan adalah kekhawatiran munculnya penderitaan yang akan ditanggung anak tersebut, aib yang harus diterima apa adanya dan tabu untuk dipublikasikan, dan sikap masyarakat yang memposisikan wanita yang hamil akibat pemeriksaan sebagai pihak yang dipersalahkan.
2. Jika alasan tersebut tidak berlaku bagi keluarga dan ibu korban pemeriksaan, maka aborsi adalah perbuatan yang diharamkan. Karena terbukti, aborsi, dengan cara aman sekalipun tetap mengandung resiko-resiko, langsung maupun tidak langsung, bagi perempuan yang melakukannya.
3. Hendaknya pemerintah memberi kejelasan hukum tentang aborsi akibat pemeriksaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh bagi korban pemeriksaan;
4. Bagi setiap korban pemeriksaan apabila hendak melakukan segala sesuatu hendaknya harus memikirkan dahulu apa penyebabnya dan bagaimana

dampaknya, misalnya, dalam hal aborsi akibat pemerkosaan, maka harus dipikirkan terlebih dahulu dampak aborsi tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992
- Ahmad Musththa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Terj. Bahrin Abubakar, Semarang: Toha Putra, 1986
- Al-Bakriy, Shalah Abdul Qadir, *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983
- Al-Bukhari, Imam, *Sahih Bukhari*, Jus III, Beirut, Dar Kitab Ilmiah, 1992
- Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Al-Mani, 2002
- Ali Bakar, Taqiyudin, bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Surabaya: Al-Hidayah, tt
- Ali, Atabik, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, Jogjakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krpyak, 1998
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, Bairut Libanon : Dar Al-Fikr, tt
- al-Kurdi, Najmudin Amin, *Tanwir al-Qulb*, Beirut Libanon : Dar Al-Fikr, tt
- Al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: al-hidayah, tt
- Al-Mundiriy, Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim , *Mukhtasar Sahih Muslim*, Beirut Libanon, Dar Al-Ilmiah, tt
- Al-qozwiniy, Al-haFiz} Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut Dar Al-Fikr, tt
- An-Naisaburi, Imam Muslim Ibn Hajaj al-Khusairi, *Sahih Muslim*, Beirut Dar Kutub Ilmiah, tt
- Ansori, Ali, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, Semarang: Toha Putra, tt
- Anwar, Moh, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971

- As'ad, Abd al-Muhaimin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, cet. I, 1993
- ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah al-Fara'idul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977
- Dahlan Abdul Aziz ...et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2005
- Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1995
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjakarta: Yayasan Penerbit Psikologis UGM, cet X, 1980
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Humam, Ibnu, *Syarh Fath Al-Qadir*, Cairo : Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1970
- Ismail, Didi Junaidi, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Ridho Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Khalaf, Abdul Wahab, “*Ilmu Ushul al Fiqh*”, Terj. Masdar Helmy, *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Prees, 1996
- Magniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Iman Ja'far as-Shadiq*, Iran : Muassasah Ashariyah, 1999
- Mahalli, Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Jogjakarta: Mitra Pustaka, 2001
- Qardawi, Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Gema Insni Pers, 2002
- Zuhdi, Masfuk., *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, Jakarta, Haji Masagung, 1992.